



LAPORAN IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN

OPTIMALISASI LAYANAN
SISTEM INFORMASI DATA AGAMA KRISTEN (SINDAK)
MELALUI INTEGRASI LAYANAN PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN KRISTEN (SPKK)

SANTI YANTI KALANGI
197709272006042001



SINDAK

SISTEM INFORMASI DATA AGAMA KRISTEN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN KRISTEN
2025



OPTIMALISASI LAYANAN SISTEM INFORMASIDATA AGAMA KRISTEN (SINDAK) MELALUI INTEGRASI LAYANAN PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN KRISTEN (SPKK)



SANTI YANTI KALANGI



**SUWARSONO
MENTOR**



**SRI MULYATI
COACH**



SCAN ME



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN KRISTEN
2025**



#AKHLAK

LAN RI

OPTIMALISASI SINDAK



Kondisi

- Proses Perizinan yang Lambat dan Manual
- Dorongan untuk Inovasi dan Transformasi Digital
- Kebutuhan Transparansi dan Akuntabilitas Layanan

Tujuan

- Menyediakan sistem layanan perizinan SPKK yang mudah diakses dan user-friendly
- Menjamin akuntabilitas dan transparansi proses perizinan
- Meningkatkan kapasitas SDM
- Menumbuhkan budaya kerja digital dan kolaboratif

Manfaat



- Transformasi Digital Layanan Perizinan -
- Transformasi Budaya Kerja -
- Transformasi Kompetensi SDM -
- Transformasi Model Layanan Publik -
- Transformasi Manajemen Risiko dan Keberlanjutan -



Solusi



SINDAK

Optimalisasi Sistem Informasi Data Agama Kristen





LAPORAN IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN

OPTIMALISASI SITEM INFORMASI DATA AGAMA KRISTEN (SINDAK) MELALUI INTEGRASI LAYANAN PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN KRISTEN (SPKK)

Disusun Oleh:

Peserta:

Santi Yanti Kalangi

NIP. 197709272006042001

Mentor:

DR. Suwarsono, S.PAK, MM

NIP.196711161989031004

Coach:

Sri Mulyati, SE,.MM

NIP. 197705312005012006

KEMENTERIAN AGAMA RI

BEKERJA SAMA DENGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA RI

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA)

ANGKATAN XVIII

TAHUN 2025



**LEMBAR PERSETUJUAN
IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN XVIII**

**OPTIMALISASI SISTEM INFORMASI DATA AGAMA KRISTEN (SINDAK) MELALUI
INTEGRASI LAYANAN PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN
PENDIDIKAN KEAGAMAAN KRISTEN
(SPKK)**

Disusun Oleh:

Nama : Santi Yanti Kalangi
NIP : 197709272006042001
Unit Kerja : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen

Telah Disetujui Pada Hari: Selasa, 2025

Coach

Sri Mulyati, SE.,MM
NIP. 197705312005012006

Mentor

DR. Suwarsono, S.PAK, MM
NIP.196711161989031004



LEMBAR PENGESAHAN
IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN XVIII

JUDUL

OPTIMALISASI SISTEM INFORMASI DATA AGAMA KRISTEN (SINDAK) MELALUI
INTEGRASI LAYANAN PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN
PENDIDIKAN KEAGAMAAN KRISTEN

(SPKK)

Oleh:

SANTI YANTI KALANGI
NIP.197709272006042001

Telah diujikan pada tanggal, 21 Mei 2025

di Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Kepemimpinan dan Moderasi
Beragama

Coach,

Sri Mulyati, SE,MM
NIP. 197705312005012006

Penguji,

Dr. Hj. Mardiyanti, M.Pd
NIP. 197001011997032004

Disahkan oleh:
Kepala Pusbangkom Manajemen Kepemimpinan dan
Moderasi Beragama

Dr. H. Syafi'i, M.Ag
NIP.19660703 199403 1 004



**LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN IMPLEMTASI AKSI PERUBAHAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Laporan Implementasi Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan XVIII Tahun 2025:

Nama Peserta	: Santi Yanti Kalangi
Jabatan	: Kepala Sub Direktorat Pendidikan Menengah
Instansi / Unit Kerja	: Ditjen Bimas Kristen
Judul Aksi Perubahan	: Optimalisasi SINDAK dalam Integrasi Layanan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Agama Kristen (SPKK)

Dinyatakan LAYAK untuk diajukan dalam Seminar Laporan Implementasi Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan XVIII, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2025 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Kepemimpinan dan Moderasi Beragama Kementerian Agama Republik Indonesia.

Jakarta, 22 Juli 2025

Mentor,

Coach,

Dr. Suwarsono, S.PAK, MM
NIP. 196711161989031004

Sri Mulyati, SE, MM
NIP. 197705312005012006

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, rahmat, dan penyertaan-Nya kami dapat menyusun program ***OPTIMALISASI SISTEM INFORMASI DATA AGAMA KRISTEN (SINDAK) MELALUI INTEGRASI LAYANAN PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN KRISTEN (SPKK)*** dengan baik dan lancar.

Laporan ini disusun sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab dalam mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator, sekaligus sebagai bentuk implementasi perubahan yang berdampak pada peningkatan kualitas layanan publik, khususnya dalam bidang pelayanan perizinan pendidikan keagamaan Kristen. Aksi perubahan ini merupakan wujud komitmen dalam mendorong transformasi digital birokrasi agar lebih responsif, efisien, dan akuntabel. Kami menyadari bahwa Implementasi Aksi Perubahan ini dapat terwujud karena bantuan dan dorongan dari banyak pihak. Kami dengan rendah hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa mencurahkan rahmat dan kasih sayangNya;
2. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Dr. Jenae Marie Tulung, S.Th.,M.Pd yang telah memberi inspirasi dan dukungan selama penyusunan Aksi Perubahan ini;
3. Direktur Pendidikan Kristen, Dr. Suwarsono, S.PAK, MM selaku mentor yang selalu arahan, dukungan, bimbingan dan masukan selama penulisan dan penyusunan rancangan Aksi Perubahan ini;
4. Sekretaris Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI, Johni Tilaar, S.Th, M.Si yang telah memberi dukungan selama penyusunan rancangan aksi perubahan.
5. Sri Mulyati, S.E.,MM selaku coach yang telah menginspirasi, memberi dorongan, masukan dan bimbingan dalam penyusunan Rancangan Aksi perubahan ini;
6. Seluruh Widyaaiswara dalam Diklat PKA Angkatan XVII yang telah membimbing, memberi pengarahan dan pemahaman untuk dapat menyusun dan mengimplementasikan Rancangan Aksi Perubahan ini;
7. Tim Kerja dan Stakeholder yang telah membantu dan mendukung penyusunan dan pelaksanaan Implementasi Aksi Perubahan ini;
8. Keluarga dan teman-teman tercinta, yang senantiasa memberikan dukungan

moril dan materil dalam menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan dan kewajiban pada masa pendidikan latihan dasar ini

9. Tim Aksi Perubahan dan teman-teman sub Direktorat Pendidikan Menengah yang membantu dalam penyusunan dan pelaksanaan Implementasi Aksi Perubahan
10. Teman-teman peserta PKA Angkatan XVII tahun 2025.

Kami menyadari bahwa laporan Implementasi Aksi Perubahan ini masih belum sempurna. Oleh karena itu kami senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan laporan ini sehingga laporan Implementasi aksi perubahan ini dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan dan pelaporan program, serta memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jakarta, Juli 2025

Penyusun



Santi Yanti Kalangi

NIP. 197709272006042001

ABSTRAK

Di tengah tuntutan zaman yang semakin mengedepankan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI merespons dengan melahirkan sebuah langkah nyata melalui optimalisasi layanan perizinan pendidikan keagamaan Kristen. Layanan ini sebelumnya dijalankan secara manual dan tidak terintegrasi, menyebabkan prosesnya lambat, berbelit, dan sulit dilacak. Situasi tersebut menimbulkan tantangan, terutama dalam menjawab kebutuhan lembaga pendidikan Kristen yang ingin memperoleh legalitas secara sah dan terdata dengan baik. Melalui aksi perubahan ini, aplikasi SINDAK (Sistem Informasi Data Agama Kristen) dioptimalkan sebagai platform digital yang bukan hanya berfungsi untuk mendata lembaga pendidikan, tetapi juga menjadi jalur utama dalam pengajuan dan pengelolaan izin operasional. Inovasi ini tidak hanya merombak sistem dari manual menjadi daring, tetapi juga menata ulang cara berpikir, cara bekerja, dan budaya pelayanan. Perubahan yang dibangun menyentuh banyak aspek: dari tata kelola, sistem informasi, SDM, hingga model pelayanan publik yang berpihak pada kebutuhan masyarakat. Tujuan dari aksi ini bukan semata digitalisasi, melainkan menciptakan sebuah ekosistem pelayanan yang lebih manusiawi di mana masyarakat bisa mengakses layanan tanpa harus datang langsung, di mana informasi bisa dilacak secara transparan, dan di mana kecepatan serta ketepatan proses menjadi standar baru. Dalam prosesnya, aksi ini melibatkan kerja sama lintas unit, membangun sistem yang dapat dipertanggungjawabkan, serta memberikan pelatihan dan pendampingan kepada para operator satuan pendidikan Kristen. Optimalisasi ini juga menunjukkan bagaimana sebuah perubahan yang sederhana, jika dijalankan dengan komitmen dan strategi yang tepat, dapat membawa dampak luas dan berkelanjutan. Melalui SINDAK, bukan hanya sistem yang berubah tetapi cara pemerintah hadir dan melayani pun ikut bergerak ke arah yang lebih baik.

Kata Kunci : Optimalisasi, SINDAK, Integrasi Layanan Digital

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
A. RINGKASAN EKSLUSIF.....	1
B. RANCANGAN AKSI PERUBAHAN	2
1. Latar Belakang	2
2. Tujuan	5
3. Manfaat Perubahan	5
4. Ruang Lingkup Aksi Perubahan.....	6
5. Analisa Masalah	8
6. Strategi Penyelesaian Masalah	18
7. Sumberdaya Organisasi (peta dan pemanfaatan)	22
8. Stakeholder aksi perubahan	24
9. Pengaruh dan Kepentingan Stakeholder.....	24
10. Strategi Pendekatan Stakeholder	28
11. Anggaran	29
12. Manajemen risiko	30
C. DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN	37
1. Membangun Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi.....	37
2. Pengelolaan Budaya Kerja	38
3. Membangun Jejaring dan Kolaborasi	39
3. Strategi Pengembangan Kompetensi.....	41
D. DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN	42
1. Capaian Bukti Perbaikan Kerja Organisasi	42

2. Manfaat Aksi Perubahan	55
a. Manfaat Internal.....	55
b. Manfaat Eksternal.....	57
3. Implementasi Pengembangan Kompetensi Dalam Aksi Perubahan	58
<i>E. KEBERLANJUTAN AKSI</i>	60
<i>F. KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN</i>	64
<i>G. DISEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN.....</i>	65
1. Strategi komunikasi.....	65
2. Strategi Membangun Dukungan dan Replikasi Aksi Perubahan	68
<i>H. PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI.....</i>	69
<i>I. PENUTUP</i>	73
<i>LAMPIRAN</i>	75
<i>REFRENSI</i>	90

A. RINGKASAN EKSLUSIF

Aksi perubahan bertajuk *“Optimalisasi Sistem Informasi Data Agama Kristen (SINDAK) melalui Integrasi Layanan Penerbitan Izin Penyelenggaraan SPKK”* bukan sekadar sebuah program teknokratis, melainkan bentuk nyata dari komitmen penulis untuk mendorong pelayanan yang lebih baik, akuntabel, dan adaptif di lingkungan Direktorat Pendidikan, Ditjen Bimas Kristen. Dalam era digital yang terus bergerak cepat, kebutuhan akan sistem informasi yang terpadu menjadi keniscayaan—terlebih dalam layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti penerbitan izin SPKK (Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen). Melalui aksi perubahan ini, penulis tidak hanya menawarkan solusi sistematis terhadap persoalan administrasi layanan, tetapi juga memulai proses transformasi budaya kerja. SINDAK dibangun bukan sekadar sebagai alat digital, melainkan sebagai ruang kerja bersama, tempat data dipertanggungjawabkan, pelayanan dipercepat, dan koordinasi antar-unit menjadi lebih cair dan kolaboratif. Penulis sadar bahwa sistem yang baik harus ditopang oleh manusia-manusia yang juga siap berubah, terbuka terhadap pembaruan, dan memiliki rasa kepemilikan terhadap proses yang sedang dijalankan.

Proses dimulai dengan koordinasi bersama Mentor, diikuti konsolidasi tim untuk menyepakati fitur yang dikembangkan. Tahap berikutnya meliputi validasi kebutuhan, desain alur kerja pengguna, pengembangan prototipe, dan pengujian sistem. Masukan dari uji coba internal menghasilkan perbaikan signifikan. Setelah sistem dinyatakan stabil, dilakukan sosialisasi internal dan nasional kepada seluruh stakeholder, termasuk Kepala Kabid/ Pembimas dan SPKK se-Indonesia. Respons sangat positif, dengan dukungan penuh terhadap fitur baru serta masukan untuk penyempurnaan seperti penyediaan tutorial dan PIC layanan. Langkah Kongkrit dalam Implementasi Aksi perubahan Jangka pendek telah berhasil 100% dilaksanakan bahkan sudah ada rencana jangka menengah yang sudah dilaksanakan. Fitur layanan izin SPKK kini telah terintegrasi secara daring di aplikasi SINDAK.

Tidak hanya itu, strategi komunikasi publik pun diperkuat melalui media sosial dan publikasi daring sebagai bagian dari keterbukaan informasi kepada masyarakat. Selain keberhasilan dalam hal teknis dan sistem, dampak dari aksi ini juga terasa dalam hal kepercayaan publik yang mulai tumbuh terhadap layanan keagamaan berbasis data. Lembaga penyelenggara SPKK kini merasa lebih dilayani, lebih mudah mengakses informasi, dan lebih cepat mendapatkan kepastian izin. Di sisi lain, internal ASN yang

terlibat menjadi lebih memahami urgensi keterbukaan, kecepatan, dan akurasi kerja. Transformasi ini tentu tidak sempurna dan masih menyisakan ruang-ruang perbaikan. Namun justru di situlah makna dari proses perubahan: bahwa perubahan adalah perjalanan panjang yang memerlukan keberanian untuk memulai, ketulusan untuk mendengar masukan, dan ketekunan untuk menjaga semangatnya tetap menyala. Aksi perubahan ini menjadi pondasi penting untuk membangun sistem yang lebih matang ke depannya. Aksi ini membuktikan bahwa inovasi yang kolaboratif dan responsif mampu menghasilkan layanan publik yang lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap kebutuhan zaman.

Penulis berharap, apa yang telah dirintis melalui SINDAK ini dapat menjadi inspirasi dan model bagi kerja-kerja transformasi serupa di masa depan bahwa sistem yang dibangun dengan nilai, dijalankan dengan kolaborasi, dan dikembangkan secara berkelanjutan, akan melahirkan dampak yang lebih dari sekadar data dan izin, tetapi juga membangun kepercayaan, kualitas, dan pelayanan yang bermartabat.

B. RANCANGAN AKSI PERUBAHAN

1. Latar Belakang

Pendidikan Keagamaan Kristen memiliki peranan strategis dalam membentuk generasi yang beriman, berakhlak, dan berkebudayaan. Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen (SPKK) hadir sebagai lembaga yang menyediakan pendidikan berbasis nilai-nilai Kristiani untuk mendukung pembangunan karakter bangsa. Untuk menjamin legalitas dan kualitas lembaga tersebut, proses perizinan penyelenggaraan SPKK menjadi sangat penting dan harus dikelola dengan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen (Ditjen Bimas Kristen) Kementerian Agama RI, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, memiliki tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang Bimbingan Masyarakat Kristen. Salah satu aspek krusial dari pelaksanaan fungsi tersebut adalah

memberikan layanan administrasi pendidikan keagamaan, termasuk pengelolaan proses pemberian izin penyelenggaraan SPKK.

Dalam konteks pendidikan keagamaan Kristen, negara memberikan ruang dan legalitas bagi penyelenggaraan satuan pendidikan keagamaan Kristen (SPKK) sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Namun, proses penerbitan izin penyelenggaraan SPKK selama ini masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi koordinasi antarinstansi, alur birokrasi yang belum terintegrasi, hingga keterbatasan sistem informasi yang mendukung pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel.

Namun demikian, dalam praktiknya, penerbitan Izin penyelenggaraan SPKK masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal efektivitas dan aksesibilitas. Selama ini, pengajuan izin masih dilakukan secara manual dan melalui komunikasi yang terbatas, sehingga menyebabkan proses lambat dan memakan waktu lama, sulit dilacak, Risiko kehilangan/ tercecer, tidak transparan dan rawan kesalahan administratif. Ketimpangan ini menciptakan jarak antara kondisi ideal yang seharusnya tercapai dengan kenyataan di lapangan. Idealnya, penerbitan Izin penyelenggaraan SPKK dilakukan secara digital, cepat, dan dapat dipantau secara daring oleh pemohon. Namun, kenyataannya, proses tersebut masih lambat, tidak terintegrasi, dan belum transparan. Satuan pendidikan keagamaan Kristen Tingkat Menengah (SMAK dan SMTK) merupakan bagian penting dari ekosistem pendidikan nasional. Namun, berdasarkan data sampai dengan bulan Desember 2025: 110 dari 211 sekolah (52,13%) akan habis masa izinnya. Hanya 3 sekolah (2,73%) yang sudah mengajukan perpanjangan izin. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan administratif dan sistem layanan yang tersedia. Salah satu penyebabnya adalah Proses pengajuan izin masih dilakukan secara manual, tahapan yang masih manual seringkali membuat sekolah belum mengajukan permohonan.

Berdasarkan hal ini maka perlu dicarikan solusi untuk menjawab permasalahan ini. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik di lingkungan Ditjen Bimas Kristen merupakan masalah krusial untuk segera diatasi, karena jika dibiarkan akan berdampak pada

rendahnya kecepatan layanan, tidak terpantaunya kualitas penyelenggara Pendidikan.

Pada Rakernas Ditjen Bimas Kristen pada Bulan Februari di Yogyakarta Tahun 2020, telah diluncurkan sebuah aplikasi data berbasis online yang diberi nama SINDAK (Sistem Informasi Data Agama Kristen). SINDAK itu sendiri mengakomodir seluruh data yang berhubungan dengan Ditjen Bimas Kristen (data Pendidikan, Pendidikan Agama maupun data yang berhubungan dengan hal-hal administratif). Aplikasi ini telah dimanfaatkan oleh Direktorat Pendidikan Kristen untuk pendataan guru dan tenaga kependidikan. Aplikasi ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai platform digital dalam layanan penerbitan izin penyelenggaraan SPKK. Namun, fitur ini belum dioptimalkan secara maksimal, dan belum menjadi bagian dari alur kerja penerbitan Izin Penyelenggaraan SPKK yang terstandar.



Oleh karena itu, aksi perubahan ini diarahkan untuk mengoptimalkan SINDAK melalui integrasi layanan penerbitan Izin penyelenggaraan SPKK. Langkah ini tidak hanya akan memperbaiki efektivitas kinerja internal, tetapi juga mendorong transformasi digital dalam pelayanan publik bidang pendidikan keagamaan. Penguatan sistem ini diharapkan menjadi solusi terhadap persoalan yang ada, sekaligus mewujudkan tata kelola layanan yang modern, adaptif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Optimalisasi SINDAK ini merupakan langkah strategis untuk mendukung pelaksanaan Asta Protas Kementerian Agama yang ke-8, yaitu "Digitalisasi Tata Kelola". Digitalisasi adalah kunci untuk layanan pendidikan

keagamaan yang murah, mudah, efisien dan transparan. Tanpa kecuali, seluruh instansi pemerintah selayaknya mengadopsi teknologi dalam kegiatannya sehari-hari sebagai salah satu bentuk perubahan yang harus dilakukan untuk memangkas birokrasi yang berbelit dan semakin mendekatkan akses ke masyarakat. Penggunaan Sistem Digital juga mendukung Asta Protas ke-2, yaitu “Penguatan Ekoteologi”. Dengan penggunaan sistem digital maka implementasi pengurangan kertas (*paperless*) mendorong perilaku ramah lingkungan.

2. Tujuan

a. Tujuan Jangka Pendek (2 Bulan)

Tersedianya fitur layanan izin penyelenggaraan SPKK (permohonan digital, unggah dokumen, Verifikasi, Notifikasi dan Laporan) yang dikembangkan dalam SINDAK dan tersedianya alur layanan

b. Tujuan Jangka Menengah (6 Bulan – 1 Tahun)

Terimplementasinya layanan izin penyelenggaraan Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen (SPKK) yang terintegrasi dalam SINDAK

c. Tujuan Jangka Panjang (Lebih dari 1 Tahun)

Tersedianya layanan penerbitan izin penyelenggaraan Satuan Pendidikan Keagamaan Tingkat Dasar dan Menengah yang terintegrasi dengan Pusdatin

3. Manfaat Perubahan

Pelaksanaan aksi perubahan ini memberikan berbagai manfaat strategis, baik secara internal bagi instansi pemerintah maupun eksternal bagi masyarakat sebagai pengguna layanan. Optimalisasi SINDAK melalui integrasi layanan izin

penerbitan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen (SPKK) tidak hanya sekadar inovasi teknis, tetapi merupakan langkah nyata untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih adaptif, responsif, dan

modern sesuai tuntutan zaman.

a. Manfaat Internal (Bagi Instansi/Penyelenggara Layanan)

- 1) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja melalui penerbitan izin penyelenggaraan SPKK yang lebih cepat dan tepat.
- 2) Memperkuat akuntabilitas internal dengan dokumentasi dan pelaporan secara digital
- 3) Mendorong penggunaan teknologi informasi untuk mendukung kinerja layanan.
- 4) Meningkatkan kompetensi pegawai melalui pelatihan dan adaptasi sistem digital.
- 5) Meminimalisir kesalahan administrasi dalam proses penerbitan izin penyelenggaraan.
- 6) Meningkatkan Transparansi dan akuntabilitas dalam layanan izin penyelenggaraan SPKK

b. Manfaat Eksternal (Bagi Masyarakat dan Pemohon)

- 1) Mempermudah akses dalam mengurus izin penyelenggaraan satuan pendidikan keagamaan Kristen.
- 2) Mempercepat waktu layanan izin penyelenggaraan satuan pendidikan keagamaan Kristen.
- 3) Meningkatkan kepercayaan terhadap kualitas dan transparansi layanan pemerintah.
- 4) Memberikan kepastian hukum bagi satuan pendidikan yangtelah memperoleh izin secara sah.
- 5) Memperluas jangkauan layanan melalui sistem daring yang dapat diakses dari berbagai wilayah.
- 6) Memfasilitasi komunikasi yang lebih terbuka antara pemohon dan petugas layanan.

4. Ruang Lingkup Aksi Perubahan

Ruang lingkup kegiatan dalam aksi perubahan ini mencakup seluruh tahapan dan komponen yang berkaitan langsung dengan upaya optimalisasi SINDAK untuk mendukung proses layanan penerbitan Izin penyelenggaraan Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen (SPKK) secara

digital. Lingkup ini tidak hanya terbatas pada aspek teknis aplikasi, tetapi juga melibatkan penguatan kapasitas sumber daya manusia, penyusunan regulasi internal, serta peningkatan sinergi antarunit kerja terkait. Secara umum, ruang lingkup kegiatan meliputi:

a. Jangka Pendek

- 1) Menyusun rencana kerja pengembangan sistem.
- 2) Menyusun fitur layanan izin penyelenggaraan SPKK (permohonan digital, unggah dokumen, Verval, Notifikasi dan Laporn) yang kembangkan dalam SINDAK dan tersedianya alur layanan
- 3) Menyusun SOP yang jelas dan rinci mengenai alur layanan penerbitan izin penyelenggaraan SPKK yang terintegrasi di SINDAK.
- 4) Pengembangan Fitur/ menambahkan fitur dalam sistem
- 5) Uji coba/ testing internal
- 6) Sosialisasi Internal

b. Jangka Menengah

- 1) Melaksanakan sosialisasi ke semua SPKK Tingkat Dasar dan Menengah
- 2) Implementasi layanan penerbitan izin penyelenggaraan SPKK melalui SINDAK
- 3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi aplikasi untuk menentukan fitur apa saja yang sudah sesuai dan fitur apa saja yang perlu ditambahkan ke dalam aplikasi, juga melakukan identifikasi error pada aplikasi
- 4) Melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi

c. Jangka Panjang

- 1) Melaksanakan rapat-rapat koordinasi untuk mengevaluasi aplikasi secara periodik
- 2) Mengintegrasikan layanan ini pada Pusdatin
- 3) Mengembangkan aplikasi secara terus menerus

5. Analisa Masalah

PROFIL KINERJA ORGANISASI

a) Deskripsi Umum

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen (Ditjen Bimas Kristen) merupakan salah satu unit kerja eselon I di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Berdasarkan PMA Nomor 33 Tahun 2024 mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Kristen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang urusan agama serta pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Kristen;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang urusan agama serta pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Kristen;
- 3) Pembinaan penyelenggaraan urusan agama serta pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Kristen;
- 4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang urusan agama serta pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Kristen;
- 5) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang urusan agama serta pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Kristen;
- 6) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

b) Visi dan Misi

1) Visi:

Terwujudnya Masyarakat Kristen yang Beriman, Rukun, Cerdas dan Sejahtera Dalam Rangka Menuju Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

2) Misi:

1. Meningkatkan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama Kristen;
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama;
3. Memantapkan Kualitas Kerukunan Internal dan Eksternal Umat Kristen;
4. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan Keagamaan Berciri Khas Kristen, Pendidikan Agama Kristen pada Satuan Pendidikan Umum;
5. Mewujudkan Tata Kelola di Lingkungan Bimas Kristen yang Bersih, Akuntabel dan Terpercaya.

Gambar 1

Bagan Struktur Organisasi Ditjen Bimas Kristen



c) Tugas dan Fungsi Direktorat Pendidikan Kristen

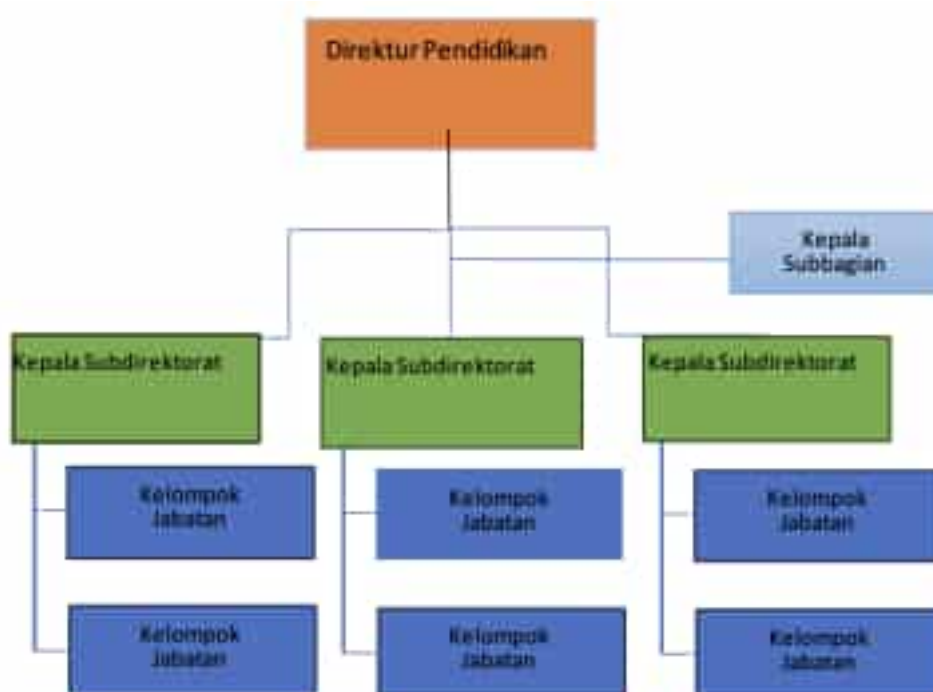
Direktorat Pendidikan Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 PMA 33 Tahun 2024 mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan agama dan keagamaan Kristen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direktorat Pendidikan Kristen menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang pendidikan agama dan keagamaan Kristen;
- 2) Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan agama dan keagamaan Kristen;
- 3) Peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik pendidikan agama dan keagamaan Kristen;
- 4) Fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan agama dan keagamaan Kristen;
- 5) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan agama dan keagamaan Kristen;
- 6) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan agama dan keagamaan Kristen;
- 7) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan agama dan keagamaan Kristen; dan
- 8) Pelaksanaan administrasi direktorat.

Gambar 2

Bagan Struktur Organisasi Direktorat Pendidikan Kristen



d) Pegawai (SDM Pengelola)

Untuk mengemban tugas pokok dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, Direktorat Pendidikan Agama Kristen didukung personil sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang, dengan rincian kriteria sebagai berikut :

Tabel 1

Jumlah Pegawai Direktorat Pendidikan Agama Berdasarkan Kategori: Pimpinan, Struktural, Fungsional dan Staf

No	Jabatan	Jumlah
1	Direktur	1
2	Kasubdit	3
3	Kasubbag TU	1
5	JF	14
6	ASN Pelaksana	15
Jumlah		34

e) Data yang relevan

Tabel 2

NO	Jenis Sekolah	Jumlah Sekolah	Ijin Habis s.d Desember 2025	Prosentasi
1	SMAK Sekolah Menenga Agama Kristen (SMAK)	67 Sekolah	20 Sekolah	20,89%
2	Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK)	144 Sekolah	90 Sekolah	68,75
	Total	211 Sekolah	110 Sekolah	

Jumlah SMAK yang telah mengajukan permohonan : 1 Sekolah

perpanjangan izin

Jumlah SMTK yang telah mengajukan

: 2 Sekolah

Analisa masalah kinerja organisasi

a). dentifikasi Masalah

Berdasarkan kondisi kinerja organisasi Ditjen Bimas Kristen pada Direktorat Pendidikan Agama Kristen khususnya Subdirektorat Pendidikan Menengah saat ini, maka terdapat isu atau permasalahan yang perlu untuk diberikan solusi. Beberapa isu yang teridentifikasi menjadi permasalahan yang menyebabkan belum efektifnya pencapaian kinerja layanan penerbitan izin penyelenggaraan SPKK pada Subdirektorat Pendidikan Menengah antara lain sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya kinerja organisasi yang memuaskan karena proses dan penerbitan izin penyelenggaraan SPKK belum efektif dan efisien karena masih menggunakan sistem manual.
- 2) Belum optimalnya alur yang tepat, cepat dan terarah dalam penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan keagamaan Kristen (SPKK) karena masih menggunakan sistem manual.
- 3) Belum optimalnya sistem pemantauan dan transparansi layanan izin penyelenggaraan SPKK
- 4) Tidak adanya platform online yang memungkinkan pemohon mengajukan izin secara digital,
- 5) Kurangnya transparansi dalam proses izin penyelenggaraan SPKK
- 6) Belum optimalnya penyelesaian tugas secara terukur oleh pelaksana tugas karena alur birokrasi yang panjang dan masih manual.

b). Pemilihan Isu Strategis

Berdasarkan isu di atas, maka perlu untuk menentukan akar

masalah untuk menjadi isu strategis yang menjadi prioritas utama untuk ditentukan solusi berdasarkan kewenangan Ditjen Bimas Kristen. Adapun untuk dapat menganalisa isu tersebut secara akurat, maka digunakan metode APKL. Metode APKL adalah salah satu metode yang digunakan untuk menguji kelayakan suatu isu untuk dicari penyelesaiannya dalam aktualisasi. Metode ini dilakukan dengan menetapkan rentang penilaian (1-5) pada kriteria berikut:

- 1) Aktual artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat;
- 2) Problematik artinya isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks, sehingga perlu dicarikan segera solusinya secara komprehensif;
- 3) Kekhalayakan artinya isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak;
- 4) Kelayakan artinya isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya, yang kepanjangannya adalah A (Aktual), P (Problematik), K (Kekhalayakan), dan L (Layak). Dengan menggunakan metode APKL dan Teknik Skoring, maka dapat diidentifikasi akar penyebab masalah yang menjadi isu, yaitu:

Tabel 3

Hasil Analisa Masalah dengan Menggunakan metode APKL

NO	ISU	A	P	K	L	TOTAL	RANGKING
1	Belum optimalnya kinerja organisasi yang memuaskan karena proses dan penerbitan izin penyelenggaraan SPKK belum efektif dan efisien karena masih menggunakan sistem manual	5	5	4	5	19	I

2	Belum optimalnya alur yang tepat, cepat dan terarah dalam penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan keagamaan Kristen (SPKK) karena masih menggunakan sistem manual.	4	4	4	4	16	III
3	Belum optimalnya sistem pemantauan dan transparansi layanan izin penyelenggaraan SPKK	4	3	4	3	14	IV
4	Tidak adanya platform online yang memungkinkan pemohon mengajukan izin secara digital	5	4	4	4	17	II
5	Kurangnya transparansi dalam proses izin penyelenggaraan SPKK	3	3	3	3	12	V
6	Belum optimalnya penyelesaian tugas secara terukur oleh pelaksana tugas karena alur birokrasi yang panjang dan masih manual	2	3	3	3	11	VI

Dari perhitungan dengan metode skoring APKL (Aktual, Problematic, Kekhayalakan dan Kelayakan) telah didapat diketahui 3 teratas urutan prioritas masalah utama dengan yaitu sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya kinerja organisasi yang memuaskan karena proses dan penerbitan izin penyelenggaraan SPKK belum efektif dan efisien karena masih menggunakan sistem manual
- 2) Tidak adanya platform online yang memungkinkan pemohon mengajukan izin secara digital.
- 3) Belum optimalnya alur yang tepat, cepat dan terarah dalam penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan keagamaan Kristen (SPKK) karena masih menggunakan sistem manual.

Kemudian data tersebut diolah lebih dalam menggunakan Teknik USG, maka

dapat dianalisa 3 prioritas masalah utama yaitu sebagai berikut:

Tabel 4

Hasil Analisa Masalah dengan Teknik USG

NO	ISU	U	S	G	TOTAL	RANGKING
1	Belum optimalnya kinerja organisasi yang memuaskan karena proses dan penerbitan izin penyelenggaraan SPKK belum efektif dan efisien karena masih menggunakan sistem manual	5	5	5	15	I
2	Tidak adanya platform online yang memungkinkan pemohon mengajukan izin secara digital.	5	5	4	14	II
3	Belum optimalnya alur yang tepat, cepat dan terarah dalam penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan keagamaan Kristen (SPKK) karena masih menggunakan sistem manual.	4	4	5	13	III

Dari perhitungan dengan metode USG (Urgent, Serious, Growth) telah didapat urutan prioritas masalah utama yaitu Belum optimalnya kinerja organisasi yang memuaskan karena proses dan penerbitan izin penyelenggaraan SPKK belum efektif dan efisien karena masih menggunakan sistem manual.

Berdasarkan identifikasi beberapa isu strategis yang muncul dalam layanan penerbitan izin penyelenggaraan SPKK pada Subdirektorat Pendidikan Menengah menggunakan metodologi APKL maupun USG, perlu dianalisa kembali mengenai terjadinya isu tersebut. Jika dianalisis menggunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat), maka penjabarannya sebagai berikut:

Strengths (Kekuatan)

- Memiliki dasar hukum dan mandat kelembagaan yang jelas dalam menyelenggarakan layanan perizinan SPKK.
- Komitmen terhadap transformasi layanan
- SDM yang memahami prosedur manual dengan baik dan memiliki pengalaman administrasi.
- Adanya kesadaran akan perlunya perbaikan sistem layanan.

Weaknesses (Kelemahan)

- Sistem masih manual, tidak terotomatisasi.
- Proses birokrasi panjang dan tidak efisien.
- Tidak ada platform digital yang mendukung pengajuan, pemantauan, dan pelaporan izin.
- Transparansi dan akuntabilitas rendah karena tidak ada sistem *tracking real-time*.
- Kinerja pelaksana tidak terukur karena tidak ada dashboard monitoring.

Opportunities (Peluang)

- SINDAK bisa menjadi **platform** yang dapat mengintegrasikan layanan perizinan
- Memudahkan dan menyederhanakan proses perizinan
- Peluang peningkatan citra organisasi melalui pelayanan publik yang modern dan responsif.
- Potensi efisiensi anggaran jangka panjang melalui digitalisasi.
- Mengimplementasikan pelestarian lingkungan dengan paperlees

Threats (Ancaman)

- Resistensi internal terhadap perubahan sistem manual ke digital.

- Keterbatasan akses bagi daerah 3T
- Keterbatasan memahami alur layanan
- Masalah jaringan yang error
- Kesulitan adaptasi SDM terhadap teknologi baru tanpa pelatihan memadai.

a. Gagasan Aksi Perubahan

Berdasarkan hasil identifikasi isu menggunakan metode AKPL dan Teknik USG dapat diketahui masalah utama yang harus dicari solusi adalah Belum optimalnya kinerja organisasi yang memuaskan karena proses dan penerbitan izin penyelenggaraan SPKK belum efektif dan efisien karena masih menggunakan sistem manual.

Berbagai alternatif gagasan solusi untuk pemecahan masalah tersebut dapat diinventarisir sebagai berikut:

- 1) Digitalisasi layanan penerbitan izin penyelenggaraan Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen (SPKK) yang terintegrasi di SINDAK
- 2) Penambahan Fitur Layanan penerbitan izin penyelenggaraan SPKK dalam SINDAK ((permohonan digital, unggah dokumen, Verval, Notifikasi dan Laporan)
- 3) Penyusunan standar operasional Prosedur (SOP) layanan izin penyelenggaraan SPKK
- 4) Meningkatkan motivasi staf untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan atau penyiapan berkas/data akurat Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen (SPKK).
- 5) Perlunya pembekalan kepada para staf untuk meningkatkan kompetensi IT khususnya dalam pengelolaan SINDAK untuk layanan penerbitan izin penyelenggaraan SPKK secara digital.
- 6) Perlunya dilakukan sosialisasi terhadap SPKK terkait layanan penerbitan izin penyelenggaraan SPKK secara digital.
- 7) Perlunya evaluasi berjenjang terkait pengintegrasian SINDAK dengan layanan penerbitan izin penyelenggaraan SPKK.

Selanjutnya untuk menentukan ranking Solusi mengatasi masalah yang benar– benar menjadi solusi yang mampu menyelesaikan masalah, perlu

perhitungan dengan menggunakan Skala Likert yaitu dengan memilih 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) sebagaimana melalui kategori sebagai berikut:

- 1) Skala 1 berarti solusi yang sangat kurang memiliki *Leverage* / daya ungkit dan sangat kurang Relevan serta sangat kurang Inovatif sebagai solusi mengatasi masalah.
- 2) Skala 2 berarti solusi yang kurang memiliki *Leverage* / daya ungkit dan kurang Relevan serta kurang Inovatif sebagai solusi mengatasi masalah.
- 3) Skala 3 berarti solusi yang cukup memiliki *Leverage*/ daya ungkit dan cukup Relevan serta cukup Inovatif sebagai solusi mengatasi masalah.
- 4) Skala 4 berarti suatu solusi memiliki *Leverage* / daya ungkit dan Relevan serta memiliki Inovasi untuk mengatasi masalah.
- 5) Skala 5 berarti merupakan solusi yang memiliki sangat *Leverage* / daya ungkit dan sangat relevan untuk menyelesaikan masalah serta solusi yang sangat berinovasi dalam menyelesaikan permasalahan.

Berikut adalah analisis solusi masalah belum optimalnya SINDAK dalam layanan penerbitan izin penyelenggaraan Satuan Pendidikan Keagamaan

6. Strategi Penyelesaian Masalah

a. Terobosan/inovasi

Optimalisasi SINDAK merupakan wujud inovasi dalam penerapan *digital organization* yang tentunya dapat menjawab tantangan transformasi digital dan perlu direspon secara cepat sesuai dengan langkah strategis yang tertuang dalam Asta Protas Digitalisasi Tata Kelola dan. Penerapan *platform digital* ini diharapkan dapat mewujudkan kualitas layanan penerbitan izin penyelenggaraan Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen (SPKK) di Indonesia semakin cepat dan akurat, karena telah menggunakan sistem yang lebih sistematis dan dapat dengan mudah terukur pencapaiannya.

Pengembangan Ide Inovatif melalui proses observasi lapangan, analisis data, serta diskusi dengan stakeholder internal, dapat dirumuskan rancangan perubahan dengan pendekatan kreatif, yaitu Optimaslisasi SINDAK melalui layanan Integrasi pnerbitan izin penyelenggaraan Satuan Pendidikan

Keagamaan Kristan (SPKK) yang sebelumnya prosesnya bersifat manual. Layanan ini, memungkinkan pemohon mengajukan izin secara online, melakukan permohonan digital, mengunggah dokumen, melacak status izin, membaca notifikasi dan menerima hasil (laporan) secara digital. Dan gagasan terbosan lanjutan bisa diimplementasikan pada seluruh SPKK tingkat Dasar dan Menengah dan bisa terintegrasi dengan Pusdatin.

b. Tahapan kegiatan/*milestone* aksi perubahan

Penetapan tahap aksi perubahan terdiri dari tahap jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Tahapan jangka pendek wajib dilaksanakan sebagai implementasi aksi perubahan karena memiliki daya ungkit pencapaian tujuan paling besar. Tahapan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 5

Tahapan Kegiatan Aksi Perubahan

NO	TAHAP UTAMA	WAKTU	HASIL/OUTPUT
I	JANGKA PENDEK 2 bulan		
1	Mengadakan pertemuan dengan Mentor untuk mengkoordinasikan rancangan Aksi perubahan dan pembentukan Tim Efektif.	22-23 Mei 2025	1. Lembar persetujuan yang sudah ditandatangani 2. Catatan arahan mentor pada lembar konsultasi 3. Dokumentasi foto/video
2	Mengadakan pertemuan dengan seluruh Staff Subdit Dikmen dan membentuk TIM Efektif dan menyusun rencana kerja	26-28 Mei 2025	1. SK TIM Efektif 2. Notulen Rapat 3. SK Tim Efektif 4. Identifikasi

	pengembangan		Kebutuhan
3	Rapat penyusunan desain fitur layanan izin penyelenggaraan SPKK , penyusunan SOP	3-13Juni 2025	1. Fitur pengajuan izin mulai dari pengajuan 2. SOP 3. Dokumentasi
4	Pengembangan Fitur/ menambahkan Fitur dalam sistem	14 -30 Juni 2025	1. Laporan hasil pengembangan 2. Foto
5	Uji coba/ testing Internal	1-15 Juli 2025	Hasil Uji Coba
6	Sosialisai hasil uji coba di Internal	16-18 Juli 2025	Tersosialisasikannya Platform yang siap digunakan
II	JANGKA MENENGAH (6 Bulan-1 Tahun)		
1	Melaksanakan Sosialisasi ke semua SPKK Tingkat Dasar dan Menengah	Agustus s.d September 2025	1. Surat Undangan 2. Panduan Vidio Tutorial
2	Implementasi layanan penerbitan izin penyelenggaraan SPKK Tingkat Dasar dan Menengah melalui aplikasi SINDAK	Oktober - November 2025	Layanan penerbitan izin Digital
3	Melaksanakan monitoring dan evaluasi aplikasi untuk menentukan fitur apa saja yang sudah sesuai, dan fitur apa saja yang perlu ditambahkan ke dalam aplikasi juga identifikasi error pada aplikasi	Desember- Januari 2025	1. Laporan hasil pelaksanaan 2. Hambatan 3. Rekomendasi perbaikan

4	Melakukan Perbaikan berdasarkan hasil evaluasi	Desember 2025	Laporan hasil perbaikan
III	Jangka Panjang (Lebih dari 1 tahun)		
1	Melaksanakan rapat-rapat koordinasi untuk mengevaluasi aplikasi secara Periodik	>2025	1. Undangan 2. Notulen 3. Dokumentasi
2	Mengintegrasikan Layanan ini pada Pusdatin	>2026	Dokumentasi Implementasi
3	Mengembangkan aplikasi secara terus menerus	>2026	1. Surat Undangan Evaluasi kepada TIM IT 2. Notulen 3. Dokumentasi

7. Sumberdaya Organisasi (peta dan pemanfaatan)

Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya dalam konteks pelaksanaan pemetaan dan pemanfaatan tim efektif baik tim internal maupun tim eksternal. Dalam hal pengelolaan, Tim Efektif diperlukan untuk melaksanakan tata kelola aksi perubahan.

Gambar 3

Struktur Organisasi / Tata Kelola Aksi Perubahan



Adapun peran masing-masing tim yang terlibat dalam penyelenggaraan aksi perubahan ini sebagai berikut :

a. **Mentor** mempunyai tugas dan tanggungjawab :

1. Memberikan arahan dan dukungan atas keseluruhan kegiatan;
2. Memberikan dukungan kepada Pemimpin Aksi Perubahan dalam mempersiapkan rancangan aksi perubahan;
3. Memberikan dukungan secara berkelanjutan selama pelaksanaan kegiatan;
4. Membantu menyelesaikan kendala/hambatan;
5. Memberikan saran dan masukan selama pelaksanaan kegiatan

b. **Pemimpin Aksi Perubahan** mempunyai tugas dan tanggung jawab :

1. Penanggung jawab atas keseluruhan Pelaksanaan Kegiatan;

2. Melakukan Tahapan Pelaksanaan aksi perubahan sesuai dengan target waktu dan arahan yang di sepakati oleh mentor;
 3. Secara Aktif melakukan diskusi dengan bertanya dan melaporkan Progres Kegiatan kepada *Coach*;
 4. Menggerakkan seluruh Steakholder dalam mendukung keseluruhan tahapan;
 5. Menyusun Laporan Aksi Perubahan kedalam deskripsi mulai proses penyusunan sampai dengan hasil / capaian.
- c. **Coach** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
1. Melakukan monitoring secara regular terhadap kegiatan peserta;
 2. Memberikan saran dan masukan selama pelaksanaan kegiatan;
 3. Melakukan intervensi bila peserta mengalami permasalahan;
 4. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan
- d. **Pranata Komputer** adalah mempunyai Tugas
1. Membuat desain fitur dan menerapkan dalam aplikasi SINDAK
 2. Melakukan evaluasi dalam penggunaan aplikasi
 3. Mempersiapkan dan bersama tim melaksanakan sosialisasi
 4. Mengembangkan aplikasi secara terus menerus
- e. **User** (Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen (SPKK)) mempunyai tugas :
1. Mengikuti sosialisasi tentang fitur dalam SINDAK
 2. Menggunakan aplikasi pada masa ujicoba
 3. Memberikan masukan-masukan terkait pelaksanaan ujicoba aplikasi

8. Stakeholder aksi perubahan

Stakeholder atau mitra kerja adalah kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. Ada juga yang mendefinisikan stakeholder merupakan orang dengan suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan. Stakeholder ini sering diidentifikasi dengan suatu dasar tertentu, yaitu dari segi kekuatan dan kepentingan relatif stakeholder terhadap isu, dari segi posisi penting dan pengaruh yang dimiliki mereka.

Stakeholder dapat juga didefinisikan sebagai perorangan maupun kelompok- kelompok yang tertarik, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi, yang berpengaruh maupun terpengaruh oleh tujuan-tujuan dan tindakan-tindakan sebuah Tim. Dalam organisasi publik, sangat penting untuk mengetahui siapa stakeholder yang memiliki kepentingan dan pengaruh terhadap program yang dimiliki oleh organisasi. Stakeholder yang terlibat dalam aksi perubahan ini terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu stakeholder internal dan stakeholder eksternal sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut.

1	Dirjen Bimas Kristen dan Direktur Pendidikan Kristen	1	Kepala Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen
2	Kasubdit Pendidikan Menengah / Kasubbag TU	2	Pengurus Yayasan
3	Staf Subdit Pendidikan Menengah dan TIM IT dan Tata Usaha	3	Operator Sekolah
4	Pelaksana Tugas	4	Komite Sekolah

9. Pengaruh dan Kepentingan Stakeholder

Selanjutnya adalah pengelompokkan stakeholder menurut pengaruh dan kepentingannya, sehingga dapat diketahui kedudukan

stakeholder tersebut dalam aksi perubahan.

Tabel 7

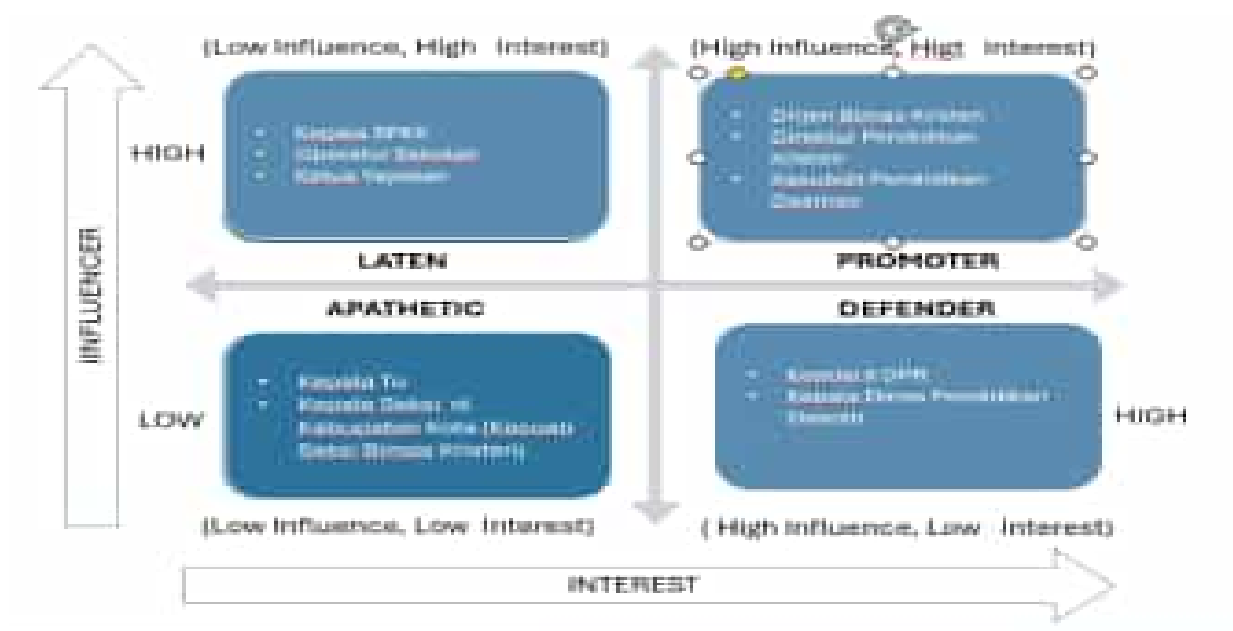
Pengaruh dan Kepentingan Stakeholder

No	Stakeholder	Pengaruh	Kepentingan
1	Dirjen Bimas Kristen dan Direktorat Pendidikan Kristen	Tinggi	Tinggi
2	Kasubdit Pendidikan Menengah / Kasubbag Tata Usaha/ Tim IT	Tinggi	Tinggi
3	Tim pengembang SINDAK	Tinggi	Tinggi
4	Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen (SPKK)	Rendah	Tinggi
5	Operator Sekolah	Rendah	Tinggi
6	Yayasan	Rendah	Tinggi
7	Dinas Pendidikan	Tinggi	Rendah
8	DPR	Tinggi	Rendah
9	LSM	Rendah	Rendah
10	Pemerhati Pendidikan	Rendah	Rendah

Tabel tersebut mengelompokkan stakeholder menjadi 4 (empat) jenis kedudukannya dalam aksi perubahan, yaitu *promoters*, *defenders*, *latens* dan *apathetic*, yang selanjutnya digambarkan dalam bagan kedudukan stakeholder berikut :

Gambar 4

Bagan Kedudukan Stakeholder Aksi Perubahan Pengaruh



Penjelasan mengenai gambar kuadran adalah sebagai berikut:

Promoters : *influence* besar, *interest* besar, memiliki kepentingan besar terhadap program dan juga kekuatan untuk membantu membuatnya berhasil

Defenders : *influence* kecil, *interest* besar, memiliki kepentingan pribadi dan dapat menyuarakan dukungannya dalam komunitas, tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi kegiatan.

Latents : *influence* besar, *interest* kecil, tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam kegiatan, tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi aksi perubahan

Apathetics : *influence* kecil, *interest* kecil, kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan, bahkan mungkin tidak mengetahui adanya kegiatan

Membangun Jejaring dan Kolaborasi Membangun jejaring dan kolaborasi merupakan salah satu kompetensi inti dalam kepemimpinan strategis. Seorang

pemimpin yang efektif tidak hanya mampu mengelola internal organisasi, tetapi juga proaktif menjalin hubungan dengan pemangku kepentingan eksternal untuk mencapai tujuan bersama. Proses kepemimpinan dalam membangun jejaring dan kolaborasi melibatkan kemampuan untuk mengenali pihak-pihak lain yang relevan, membangun kepercayaan, menyatukan visi, serta menciptakan sinergi antar individu atau organisasi yang memiliki kepentingan yang sama. Sebagai langkah pertama dalam proses ini adalah pemetaan stakeholder, yaitu mengidentifikasi siapa saja pihak yang berpengaruh atau memiliki peran dalam keberhasilan program atau kegiatan yang kita rancang. Setelah itu, dilakukan pendekatan komunikasi yang adaptif dan persuasif, guna membangun kepercayaan dan saling pengertian. Pemimpin harus menjadi fasilitator yang mampu mengelola perbedaan, menyelaraskan tujuan, serta menciptakan komitmen bersama untuk kolaborasi jangka Panjang, sedangkan kolaborasi tersebut merupakan kerja secara bersama atau bisa dikatakan bekerja bersama dengan beberapa pihak yang terkait di dalam suatu kegiatan untuk mencapai tujuan. Dalam praktiknya, kolaborasi tidak hanya sebatas kerja sama formal melalui nota kesepahaman (MoU), tetapi juga mencakup interaksi informal, pertukaran sumber daya, penguatan kapasitas bersama, dan ko kreasi solusi inovatif. Pemimpin berperan penting sebagai katalisator perubahan, yang mendorong terciptanya ekosistem yang mendukung kolaborasi lintas sektor, baik antara pemerintah, swasta, masyarakat, maupun akademisi. Keberhasilan dalam membangun jejaring dan kolaborasi dapat meningkatkan efektivitas program, memperluas dampak, serta mempercepat pencapaian visi organisasi secara berkelanjutan

Tantangan terbesar kepemimpinan dalam implementasi aksi perubahan ini adalah menggeser kualitas pengaruh dan kepentingan stakeholders agar lebih kuat dan dirasakan dampaknya. Dari klasifikasi stakeholder berdasarkan Pengaruh/Power dan Ketertarikan/Interest, berikut pergeseran posisi stakeholder yang berhasil dilakukan project leader untuk meningkatkan dukungan terhadap implementasi aksi perubahan Optimalisasi SINDAK dalam layanan penerbitan izin penyelenggaraan SPKK:

1. Memindahkan Stakeholder dari Latent ke Promoter, tujuannya adalah meningkatkan keterlibatan aktif dari pihak yang berkuasa namun kurang berminat, dengan strategi memberi informasi yang relevan, memperlihatkan dampak nyata, dan mengaitkan BMN dengan kepentingan strategis mereka, yaitu Humas, dari Latent menjadi Promoter dengan dilibatkan penuh dalam penyebaran informasi dashboard dan kampanye transparansi asset
2. Memindahkan Stakeholder dari Defender ke Latent, tujuannya adalah untuk memberdayakan kelompok yang selama ini terdampak langsung agar punya daya pengaruh lebih terhadap kebijakan BMN, yaitu Dosen/Tendik/ Mahasiswa, dengan memberikan akses informasi publik aset seperti ruang belajar, inventaris laboratorium, dll. Dan jangka panjang dengan memberikan ruang dalam pengambilan keputusan aset (misal pemanfaatan ruang/lab), serta dilibatkan dalam pemanfaatan dan pengawasan aset kampus, yaitu dengan strategi menyediakan fitur feedback aset dan alokasi ruang kerja pada dashboard.

10. Strategi Pendekatan Stakeholder

Strategi Pendekatan Stakeholder adalah strategi yang digunakan dalam upaya meningkatkan koordinasi antar stakeholder, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 8

Strategi Pendekatan Stakeholder

Stakeholder	Strategi
<i>Promoters (+ +)</i>	- Koordinasi dan konsultasi - Melibatkan promotor dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi

	- Meningkatkan motivasi dan kompetensi
<i>Latens (+ -)</i>	- Menjaga koordinasi dan komunikasi - Menunjukkan upaya yang dilakukan memiliki efek positif terhadap isu yang menjadi perhatiannya
<i>Defenders (- +)</i>	- Melaksanakan koordinasi - Sebagai unsur kolaborasi untuk aksi perubahan
<i>Apatetics (- -)</i>	- Pemberitahuan adanya aksi perubahan - Permintaan dukungan aksi perubahan

11. Anggaran

Anggaran dalam aksi perubahan ini dapat diestimasi berdasarkan tabel berikut ini:

Tabel 9

Estimasi Anggaran

NO	KEGIATAN	VOLUME	JUMLAH
1	Jangka Pendek (2 Bulan)		
	Melaksanakan FGD desain fitur dan panduan layanan penerbitan izin penyelenggaraan SPPK yang terintegrasi dengan SINDAK)	2 X	45.000.000
2	Jangka Menengah (6 Bulan-1 Tahun)		
	Penambahan fitur dan pelaksanaan uji coba pemanfaatan layanan penerbitan	3 X	30.000.000

	izin penyelenggaraan SPPK yang terintegrasi dengan SINDAK		
3	Jangka Panjang (> 1 Tahun)		
	Tersedianya layanan penerbitan izin penyelenggaraan Satuan Pendidikan Keagamaan Tingkat Dasar dan Menengah yang terintegrasi di SINDAK	3 X	50.000.000
Total			120.000.000

12. Manajemen risiko

Manajemen Risiko untuk rancangan aksi perubahan ini dapat dilaksanakan dan diketahui melalui berbagai perhitungan Risiko yang akan dihadapi dari setiap kegiatan pada saat proses aksi perubahan, baik pada kegiatan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Kemampuan Peserta dalam Menyusun Kegiatan Strategis dan Analisis Risiko, sebagai pelaksana aksi perubahan, peserta menunjukkan kemampuan dalam menyusun kegiatan yang sistematis dan terarah guna memperoleh strategi terbaik. Penyusunan ini tidak hanya mempertimbangkan tahapan rencana aksi, tetapi juga melibatkan proses identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko secara menyeluruh, agar inovasi dapat berjalan sesuai harapan, seperti yang tertuang dalam tabel dibawah ini:

Tabel 10

Potensi Resiko Dan Strategi Antisipasi Aksi Perubahan

NO	KEGIATAN	POTENSI MASALAH/KENDALA	RISIKO DAN ANTISIPASI
JANGKA PENDEK			

1	Mengadakan pertemuan dengan Mentor untuk mengkoordinasikan TIM Efektif untuk rancangan/ desain dan sistem layanan SINDAK	Mentor ada acara/dinas luar	Risiko: Kegiatan tidak segera berjalan Antisipasi: Melaksanakan koordinasi dengan mentor dengan daring
2	Mengadakan pertemuan dengan seluruh Staff Subdit Dikmen dan membentuk TIM Efektif dan menyusun rencana kerja pengembangan	1. Calon anggota tim masih dalam kesibukannya masing-masing atau dinas luar 2. Kurangnya partisipasi aktif Tim	Risiko: Kegiatan tidak segera berjalan lancar Antisipasi: Melaksanakan penyamaan persepsi dengan calon anggota tim secara hybrid
3	Rapat penyusunan desain fitur, penyusunan SOP	Anggota TIM tidak lengkap dan waktu pengembangan terbatas	Risiko: Penambahan fitur ditunda dan target waktu tidak tercapai Antisipasi: Melaksanakan koordinasi lebih intens TIM, mentor.
JANGKA MENENGAH			
1	Melaksanakan Sosialisasi ke semua SPKK Tingkat Dasar dan Menengah yang lebih lengkap	1. Tidak semua SPKK hadir 2. Kedala Jaringan 3. Variasi pemahaman dengan waktu yang	Risiko: Tidak semua paham sehingga sulit menggoprasikan sistem Antisipasi:

		singkat	Sosialisasi secara kontinu , buat panduan visual
2	Implementasi layanan penerbitan izin penyelenggaraan SPKK Tingkat Dasar dan Menengah melalui SINDAK	Pemohon tidak paham dengan sistem	Risiko: proses pengajuan izin terhambat Antisipasi: Melakukan pendampingan selama masa transisi.
3	Melaksanakan monitoring dan evaluasi aplikasi untuk menentukan fitur apa saja yang sudah sesuai, dan fitur apa saja yang perlu ditambahkan ke dalam aplikasi juga identifikasi error pada Aplikasi	Tidak semua operator memberikan feed back	Risiko: Sulit mengevaluasi Antisipasi: Intens berkomunikasi daring dengan operator
JANGKA PANJANG			
1	Melaksanakan rapat-rapat koordinasi untuk mengevaluasi aplikasi secara Periodik	Operator sekolah tidak hadir/ tidak mengikuti karena ada kegiatan	Risiko: Tidak semua bisa menerapkan Antisipasi: Melakukan pendampingan lagi kepada yang belum

2	Mengintegrasikan Layanan ini pada Pusdatin	Staff DBK tidak taggap merespon	Risiko: Implementasi sistem tidak berjalan maksimal Antisipasi: Melakukan koordinasi secara intens dengan staff pengelola
3	Mengembangkan aplikas secara terus menerus	Tim lambat bekerja	Risiko: Aplikasi tidak optimal dilakukan Antisipasi: penyamaan persepsi Dengan programmer dan staf pelaksana

7. PEMETAAN SIKAP PERILAKU KEPEMIMPINAN DAN RENCANA STRATEGI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

a. Pemetaan sikap perilaku kepemimpinan

Pemetaan sikap perilaku kepemimpinan adalah proses identifikasi sikap dan perilaku pemimpin, pemetaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu organisasi bertindak sesuai dengan nilai, norma dan aturan yang berlaku serta memberikan dukungan

dan kontribusi pemikiran sehingga gagasan, ide dan tujuan organisasi dapat terwujud.

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA

Nama Peserta : Irena Yanti Kurniati
NIP : 197305272006042001
Jabatan : Koordinator Pendidikan Manajerial
Instansi : Ditjen Binaar Kritis
Program : D

Nama Mentor : Dr. Endang Simanungkalit, MTS
NIP : 196706081956032002
Jabatan : Direktur Pendidikan Kritis
Instansi : Ditjen Binaar Kritis

	Nilai Komponen				Kualifikasi Total Komponen
	Komponen Integritas	Komponen Kerjasama	Komponen Mengelola	Rata-Rata Total	
Peserta	8,11	8,17	8,00	8,09	Baik
Mentor	8,02	8,20	8,00	8,07	Baik
Nilai Rata-Rata Per Komponen	8,11	8,17	8,00	8,09	Baik
Kualifikasi Per Komponen	Baik	Baik	Baik	Baik	

Keterangan Kualifikasi

8,00-10 : Istimewa
 7-8,99 : Baik
 6-6,99 : Cukup
 5-5,99 : Kurang
 1-4,99 : Sangat Kurang

Nilai Sikap Perilaku

8,09

Kualifikasi:
Baik

REKOMENDASI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI:

Istimewa	- Mempertahankan nilai pada komponen pada Formasi Peserta atau Mentor dan Rutup nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terarah pada saat melaksanakan aksi pembekalan dengan bimbingan dan pendampingan sebagai baik penggerak atau perilaku untuk mendukung jabatan pimpinan yang lebih tinggi
Baik	- Mempertahankan nilai pada komponen pada Formasi Peserta atau Mentor dan Rutup nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terarah pada saat melaksanakan aksi pembekalan dengan bimbingan dan pendampingan yang terarah sebagai baik pelaksana atau perilaku dalam jabatan Administrator
Cukup	- Mempertahankan nilai pada komponen pada Formasi Peserta atau Mentor dan Rutup nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terarah pada saat melaksanakan aksi pembekalan dengan bimbingan dan pendampingan yang terarah sebagai baik pelaksana atau perilaku dalam menjalankan jabatan Administrator
Kurang Sangat Kurang	- Mempertahankan nilai pada komponen pada Formasi Peserta atau Mentor dan Rutup nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terarah pada saat melaksanakan aksi pembekalan dengan bimbingan, pendampingan yang sangat ketat dan selektif agar melibatkan ahli pengkaji keprofesional internal dan peserta sebagai baik pelaksana atau perilaku dalam mendukung jabatan Administrator

Hasil penilaian mandiri menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari ketiga aspek komponen sebagaimana tercantum dalam rekap nilai akhir sikap perilaku adalah komponen, yakni aspek integritas 8,11 aspek kerjasama 8,17 dan aspek mengelola perubahan sebesar 8,00. Meskipun ketiga aspek tersebut berada dalam kualifikasi yang sama (baik), aspek mengelola perubahan tercatat sebagai aspek dengan nilai paling rendah. Hal ini mengindikasikan perlunya perhatian khusus pada penguatan kemampuan dalam mengelola perubahan, tanpa mengesampingkan aspek integritas dan kerjasama.

Oleh karena itu, project leader perlu memberikan perhatian serius terhadap aspek Kerjasama, tanpa mengabaikan kedua aspek lain. Dengan kata lain, project leader perlu mengembangkan ketiga aspek

komponen secara komprehensif dalam aksi perubahan. Dari aspek integritas, project leader harus bisa memberikan contoh dalam bertindak yang sesuai dengan nilai, norma dan aturan yang berlaku dalam hal tanggung jawab, komitmen, disiplin, kejujuran dan konsisten. Dari aspek kerjasama, project leader perlu meningkatkan kemampuan dalam hal komunikasi efektif, koordinasi dan kerjasama dengan pihak internal maupun eksternal secara fleksibel, terbuka, responsif, serentak harus meningkatkan kapasitas manajerial dan negosiasi agar bisa mengelola tim dengan baik. Dari aspek mengelola perubahan, project leader, harus melakukan pengembangan diri melalui belajar mandiri termasuk penguasaan teknologi guna mengarahkan seluruh elemen dalam organisasi menuju tujuan yang telah ditetapkan.

b. Rencana strategis pengembangan potensi diri

Sebagai agen perubahan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penerbitan izin penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kristen, saya menyadari bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kapasitas pribadi dalam hal kepemimpinan, pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai spiritual yang terinternalisasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengembangan diri yang bersifat terencana dan berkelanjutan, baik dari sisi teknis, manajerial, maupun sosial kultural. Langkah pertama dalam pengembangan potensi diri ini adalah :

Tabel 11

Strategi pengembangan Potensi Diri

No	Strategi Penguatan Potensi Diri	Tujuan	Keterangan	Waktu Pelaksanaan
1	Meningkatkan kemampuan belajar dan adaptasi	Cepat beradaptasi dengan perubahan teknologi.	Dengan membaca, mentoring	Bulan Juni
2	Mengikuti pelatihan/change management workshop	Meningkatkan pemahaman teori dan praktik dalam mengelola perubahan	Dilaksanakan sepanjang pelaksanaan aksi	Dimulai bulan Mei
3	Coaching atau Mentoring dengan atasan/leader yang berpengalaman	Mendapat <i>insight</i> praktis dari pengalaman nyata dalam memimpin perubahan	Sesi berkala per bulan atau triwulan	Sepanjang pelaksanaan Aksi Perubahan
4	Kolaborasi di Internal dengan TIM IT, bagian hukum, perencanaan dan keuangan	Terciptanya susana kolaboratif untuk mendukung proses digitalisasi penerbitan izin dan alurnya	Dilaksanakan sepanjang pelaksanaan aksi perubahan	Sepanjang pelaksanaan aksi perubahan

Tabel 12
Strategi pengembangan Potensi Diri TIM Efektif

No	Strategi Penguatan Potensi Diri	Tujuan	Keterangan	Waktu Pelaksanaan
1	Melakukan refleksi berkala	Menggali ide inovatif	Dengan Diskusi/ FGD	Sepanjang Uji Coba
2	Melakukan Simulasi Pelayanan	Mengasah empaty terhadap kebutuhan layanan	Melalui Ujicoba berkala	Bulan Juni

C. DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN

1. Membangun Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Dalam rangka mewujudkan tata kelola organisasi yang sehat dan berdaya guna di lingkungan Direktorat Pendidikan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, integritas dan akuntabilitas menjadi nilai dasar yang tidak dapat ditawar. Kedua prinsip ini menjadi landasan utama dalam mencapai tujuan kelembagaan sekaligus menjaga kredibilitas pelayanan publik yang berorientasi pada mutu pendidikan Kristen di Indonesia. Membangun integritas dan akuntabilitas dalam kinerja organisasi bukanlah sekadar menetapkan aturan atau indikator, tetapi merupakan proses berkelanjutan yang memerlukan keteladanan, keterlibatan aktif, dan sistem yang mendukung. Dalam konteks Aksi Perubahan “Optimalisasi Fitur Layanan Perizinan SPKK pada Aplikasi SINDAK”, proses kepemimpinan memainkan peran strategis dalam meletakkan dasar nilai dan budaya kerja yang berorientasi pada tanggung jawab serta transparansi.

Proses ini dimulai dari kepemimpinan berbasis keteladanan, di mana pemimpin proyek menunjukkan komitmen pribadi terhadap nilai integritas melalui

konsistensi antara ucapan dan tindakan. Dalam setiap koordinasi dan pengambilan keputusan, pemimpin menampilkan transparansi proses, keterbukaan terhadap masukan, serta keberanian untuk mengakui keterbatasan atau hambatan secara jujur kepada tim maupun pemangku kepentingan lainnya. Keteladanan ini menjadi pijakan awal terbentuknya budaya kepercayaan dalam tim. Selanjutnya, integritas dibangun melalui komunikasi yang jelas, terbuka, dan partisipatif. Pemimpin secara aktif melibatkan tim dalam menyusun tujuan, indikator keberhasilan, serta mekanisme evaluasi yang dapat dipertanggung jawabkan bersama. Proses desain fitur sistem SINDAK, misalnya, dilakukan melalui pendekatan kolaboratif yang menekankan pada transparansi fungsi, efisiensi proses, dan kejelasan alur verifikasi agar tidak membuka celah bagi manipulasi.

Di saat yang sama, akuntabilitas ditanamkan melalui sistem kerja yang terdokumentasi dengan baik dan mekanisme umpan balik yang responsif. Setiap progres pengembangan fitur, hasil uji coba, hingga tindak lanjut atas masukan peserta sosialisasi dicatat dan ditindaklanjuti sebagai bentuk tanggung jawab terhadap hasil kerja. Project leader memastikan bahwa setiap pihak, baik pengembang, pelaksana, maupun pengguna, memahami perannya dan bertanggung jawab atas kinerjanya.

2. Pengelolaan Budaya Kerja

Pengelolaan budaya kerja merupakan bagian esensial dalam membentuk atmosfer organisasi yang produktif dan selaras dengan visi-misi kelembagaan. Di lingkungan Direktorat Pendidikan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, penguatan budaya kerja tidak hanya menjadi slogan, tetapi dihidupi dalam praktik keseharian. Budaya kerja mencerminkan bagaimana pegawai berinteraksi, menjalankan tugas, serta berkolaborasi dalam membangun pelayanan pendidikan Kristen yang unggul. Kementerian Agama mengusung lima nilai budaya kerja Integritas, Profesionalitas, Inovasi, Tanggung Jawab, dan Keteladanan yang menjadi pedoman moral dan operasional bagi seluruh ASN. Di lingkungan Direktorat Pendidikan, penulis secara konsisten menerapkan nilai-

nilai tersebut, terutama melalui keteladanan dalam kepemimpinan. Penulis hadir sebagai figur pemimpin yang tidak hanya memandu dengan arahan, tetapi juga melalui tindakan nyata yang mencerminkan integritas dan tanggung jawab.

Sebagai bentuk implementasi budaya kerja, penulis secara rutin mengadakan rapat mingguan setelah apel pagi guna meninjau target kerja yang sedang berlangsung dan mengevaluasi capaian dari minggu sebelumnya. Rapat ini menjadi forum dialogis yang mendorong partisipasi aktif ASN, menghidupkan semangat kolektif dalam mencapai target kinerja, dan memperkuat rasa kepemilikan terhadap visi bersama. Dengan semangat profesionalitas dan inovasi, setiap program kerja disusun dan dilaksanakan secara sistematis, akuntabel, dan terbuka terhadap masukan yang membangun. Melalui langkah-langkah tersebut, Direktorat Pendidikan Ditjen Bimas Kristen tidak hanya berfungsi sebagai unit pelaksana teknis, tetapi juga tumbuh menjadi organisasi pembelajar yang adaptif, berintegritas, dan responsif terhadap dinamika pelayanan pendidikan keagamaan Kristen di Indonesia.

3. Membangun Jejaring dan Kolaborasi

Pelaksanaan aksi perubahan yang telah diseminarkan memasuki tahap implementasi pada periode Mei hingga Juli 2025, sebagai fase awal yang strategis untuk memastikan keberhasilan program. Dalam konteks Direktorat Pendidikan Ditjen Bimas Kristen, implementasi aksi perubahan ini berfokus pada optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Data Agama Kristen (SINDAK) dengan mengintegrasikan proses layanan penerbitan izin penyelenggaraan SPKK ke dalam satu sistem yang efisien, transparan, dan terstandar secara nasional.

Guna mencapai tujuan tersebut, diperlukan dukungan kolaboratif dari berbagai pihak yang memiliki peran penting, baik dari internal unit kerja maupun pihak eksternal. Penyusunan peta pemangku kepentingan (stakeholders mapping) menjadi langkah penting agar setiap bentuk kerja sama yang dibangun bersifat tepat sasaran, efektif, dan mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan layanan pendidikan keagamaan Kristen.

Kelompok pemangku kepentingan dalam pelaksanaan aksi perubahan ini terdiri dari:

Stakeholders Internal:

- Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI
- Direktorat Pendidikan Ditjen Bimas Kristen
- Subdirektorat Pendidikan Dasar dan Menengah
- Subdirektorat Pendidikan Tinggi
- Subbagian Tata Usaha Direktorat Pendidikan
- Tim teknis pengelola dan pengembang SINDAK
- Operator sistem pendidikan Kristen di pusat dan daerah
- Staff bidang kelembagaan
- Pejabat fungsional yang mendukung proses administrasi dan teknis

Stakeholders Eksternal:

- Kanwil Kementerian Agama Provinsi seluruh Indonesia (bidang Kristen)
- Kankemenag Kabupaten/Kota
- Yayasan gereja,
- dinas pendidikan daerah Instansi pemerintah daerah seperti Dinas Pendidikan
- Pengguna layanan pendidikan dan masyarakat umum
- Mitra publikasi dan penyedia teknologi informasi

Dengan penguatan jejaring dan komitmen kerja sama antara seluruh pemangku kepentingan, program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan keagamaan Kristen, mempercepat proses legalisasi SPKK, serta menghadirkan sistem data yang kredibel sebagai rujukan utama dalam pengambilan keputusan di bidang pendidikan Kristen ke depan.

Selain mendapatkan dukungan dari para pejabat struktural tingkat pusat, penulis juga secara aktif membangun kolaborasi lintas unit dalam rangka mendukung persiapan dan pelaksanaan implementasi aksi perubahan. Kolaborasi ini menjadi fondasi dalam upaya pengembangan dan integrasi

layanan perizinan SPKK ke dalam Sistem Informasi Data Agama Kristen (SINDAK), sehingga proses yang dijalankan menjadi lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada mutu layanan. Langkah awal yang dilakukan adalah membentuk tim efektif yang berperan sebagai motor penggerak dalam pelaksanaan aksi perubahan. Tim ini bekerja secara terkoordinasi dalam menyusun strategi teknis, mengelola tahapan kegiatan, serta memastikan bahwa proses integrasi sistem berjalan sesuai dengan rencana. Melalui tim efektif, dilakukan sinergi lintas unit kerja, termasuk menjalin komunikasi aktif dengan bagian HUMAS Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI guna memastikan kesiapan teknis sistem dan peningkatan kapasitas pelaksana layanan SPKK.

Selain itu, kerja sama eksternal juga dijalin dengan berbagai pihak strategis, seperti lembaga penyelenggara SPKK, yayasan, tokoh-tokoh pendidikan, dan mitra keagamaan Kristen. Komunikasi dan kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan mampu menjawab kebutuhan nyata di lapangan dan mendapat dukungan dari para pengguna layanan. Keterlibatan para pihak eksternal tidak hanya memperkaya perspektif, tetapi juga memperkuat legitimasi dan daya guna sistem informasi yang dibangun. Komitmen terhadap kolaborasi yang inklusif ini mencerminkan keseriusan dalam mewujudkan layanan pendidikan Kristen yang adaptif dan berbasis pada prinsip integritas, akuntabilitas, serta semangat gotong royong antar pemangku kepentingan. Aksi perubahan ini tidak hanya sebatas inovasi teknis, tetapi juga menjadi bagian dari upaya besar untuk membangun tata kelola pendidikan keagamaan Kristen yang lebih kuat dan moderatif dalam semangat pelayanan publik.

3. Strategi Pengembangan Kompetensi

Untuk mendorong keberhasilan aksi perubahan *“Optimalisasi SINDAK dalam Integrasi Layanan Penerbitan Izin Penyelenggaraan SPKK”*, proses kepemimpinan tidak hanya difokuskan pada aspek teknis semata, tetapi juga pada penguatan kompetensi kepemimpinan yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi solusi. Yaitu:

1. Penguatan Kompetensi Visioner dan Strategis

Mengembangkan pola pikir strategis melalui identifikasi masalah layanan perizinan dengan melihat kebutuhan integrasi sistem secara menyeluruh dan menyusun rencana aksi yang terukur dan berdampak langsung terhadap efisiensi dan efektifitas layanan.

2. Kepemimpinan Kolaboratif

Dengan mengembangkan keterampilan koordinasi, membangun komunikasi yang efektif lintas sektor, serta mengelola dinamika kerja sama yang produktif.

3. Pengambilan Keputusan Berbasis Data

Pembiasaan menggunakan data dan informasi yang tersedia dalam pengambilan keputusan. Kompetensi ini dilatih melalui simulasi kasus dan pembelajaran langsung menggunggah dokumen, melacak status.

5. Monitoring Implementasi Aksi Perubahan

Melakukan monitoring dan evaluasi mengidentifikasi hambatan, serta perbaikan sistem agar Integrasi layanan penerbitan izin penyelenggaraan SPKK melalui Aplikasi SINDAK dapat berjalan dengan baik .

D. DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN

1. Capaian Bukti Perbaikan Kerja Organisasi

Capaian Minggu 1

Dalam semangat perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*), sesi koordinasi dengan Mentor pada tanggal 23 Mei 2025 tidak hanya difokuskan pada pelaporan progres rutin. Pertemuan ini dimanfaatkan sebagai momentum untuk melakukan *brainstorming* dan diskusi strategis mengenai arah pengembangan Aksi Perubahan ke depan. Selain memaparkan laporan kemajuan yang telah dicapai, *project leader* secara proaktif mengangkat gagasan tentang optimalisasi pemanfaatan fitur pada aplikasi SINDAK. Isu ini diajukan dengan harapan untuk mendapatkan dukungan atas ide pengoptimalan SINDAK

serta pandangan dari Mentor mengenai potensi-potensi pengembangan yang belum tergal, guna memastikan Aksi Perubahan dapat memberikan dampak yang lebih maksimal. Gagasan tersebut mendapat sambutan yang sangat positif. Mentor menyatakan dukungan penuh terhadap ide pengoptimalan SINDAK dan memberikan arahan untuk mengkaji gagasan tersebut lebih dalam bersama tim. Dukungan ini menjadi penegasan bahwa inovasi dan upaya untuk melampaui target yang ada merupakan langkah yang dihargai dan selaras dengan visi pimpinan.

Menindaklanjuti dukungan dan arahan strategis yang diterima dari Mentor, pada tanggal 26 Mei 2025, diselenggarakan pertemuan konsolidasi bersama Tim Efektif di Ruang Kasubdit Pendidikan Menengah. Rapat yang dipimpin oleh Project Leader, dihadiri oleh Staf Pelaksana dan Pranata Komputer untuk membahas rencana teknis optimalisasi SINDAK. Latar belakang utama pengembangan fitur ini adalah untuk mendukung digitalisasi layanan, transparansi proses, dan implementasi program Menteri Agama yaitu Tata Kelola Digital dan protas menuju lingkungan kerja tanpa kertas (*paperless*). Dalam sesi diskusi yang produktif, tim merumuskan beberapa tujuan utama, di antaranya adalah mempermudah lembaga mengajukan izin SPKK secara daring, mempercepat proses verifikasi, serta menyediakan dasbor pemantauan untuk pengelola. Untuk mencapai tujuan tersebut, rapat menyepakati beberapa fitur kunci yang akan dikembangkan, yaitu:

Sebagai hasil konkret pertemuan, ditetapkan beberapa tindak lanjut yang jelas. Tim Efektif akan segera memulai proses inventarisasi kebutuhan, sementara tim pengembang diminta untuk mulai menyiapkan desain awal fitur. Seluruh pihak juga menyepakati untuk mengadakan rapat koordinasi lanjutan yang dijadwalkan pada 3 Juni 2025 untuk membahas kemajuan dari tindak lanjut tersebut.

Menyusun Rancangan Kerja



Gambar 1.



Gambar 2.

https://drive.google.com/drive/folders/1_IIRU2NGO2qLfVU6vkYclZ1LjSlif-VW

Capaian Minggu 2

Sebagai tindak lanjut dari rapat konsolidasi Tim Efektif, pada tanggal 3 Juni 2025 diselenggarakan diskusi teknis yang melibatkan Tim Efektif, Pengembang (Prakom), dan Staf Pelaksana. Fokus utama diskusi adalah melakukan validasi atas inventarisasi kebutuhan yang telah disusun. Proses ini penting untuk memastikan bahwa tim pengembang (Prakom) memiliki pemahaman yang sama dan mendalam dengan tim pengguna mengenai fungsionalitas yang diharapkan dari optimalisasi aplikasi SINDAK. Hasil dari diskusi ini adalah analisis terhadap berbagai usulan fitur. Melalui dialog yang konstruktif, berhasil dicapai sebuah keputusan konkret, yaitu penentuan prioritas pengembangan aplikasi SINDAK. Prioritas ini disusun berdasarkan urgensi kebutuhan layanan, dampak fungsional, dan estimasi kompleksitas teknis.

Merealisasikan rencana pengembangan yang telah disepakati, pada tanggal 05 Juni 2025 digelar Rapat Penyusunan Desain Fitur untuk Layanan Izin Penyelenggaraan SPKK. Rapat kerja ini dihadiri oleh Staf Pelaksana dan

Pengembang (Prakom) untuk merumuskan detail alur pengguna. Aspek utama yang menjadi penekanan dalam sesi desain ini adalah kemudahan dan transparansi. Fitur dirancang untuk memberikan kemudahan dalam proses penerbitan izin, sekaligus memungkinkan pihak SPKK untuk dapat melihat progres pengajuan izinnya secara real-time. Output konkret dari rapat ini adalah tersusunnya alur kerja pengguna (user workflow) yang detail. Alur kerja ini memetakan setiap langkah, mulai dari pengajuan oleh pihak sekolah hingga proses verifikasi dan penerbitan izin. Dengan difinalisasikannya alur kerja ini, maka sebagai langkah selanjutnya, Prakom akan langsung memulai tahap pengembangan (coding) untuk mewujudkan fitur tersebut ke dalam aplikasi SINDAK.

Melaksanakan diskusi dengan pengembang prakom



Gambar 3.



Gambar 2.

<https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive>

https://drive.google.com/drive/folders/1_IIRU2NGO2qLfVU6vkYclZ1LjSlif-VW

Capaian Minggu 3

Menindaklanjuti finalisasi alur kerja pengguna (*user workflow*), tim melangkah ke tahap selanjutnya yang lebih teknis dan visual. Pada tanggal 10

Juni 2025, dilaksanakan sesi kerja intensif untuk penyusunan desain fitur yang melibatkan kolaborasi antara Tim Efektif dan Pengembang (Prakom). Tujuan utama sesi ini adalah untuk menerjemahkan alur kerja yang bersifat konseptual menjadi sebuah rancangan antarmuka yang konkret dan dapat diuji. Tim bekerja sama untuk merancang setiap elemen pada fitur layanan perizinan SPKK. Output dari kegiatan ini adalah terwujudnya sebuah rancangan alur integrasi layanan penerbitan izin penyelenggaraan tersebut. Prototipe ini divisualisasikan dalam bentuk halaman/tab baru yang akan diintegrasikan ke dalam aplikasi SINDAK. Dengan adanya prototipe ini, tim dapat melihat dan merasakan secara langsung bagaimana fitur tersebut akan berfungsi dari sudut pandang pengguna, sebelum proses pengembangan teknis (*coding*) sepenuhnya dimulai.

Penyusunan Desain dan Penyusunan SOP



Gambar 5.



Gambar 6.

<https://drive.google.com/drive/u/0/home>

https://drive.google.com/drive/folders/1_IIRU2NGO2qLfVU6vkYclZ1LjSlif-VW

Capaian Minggu 4

Sebagai langkah proaktif dalam menjamin keberlanjutan dan penyempurnaan Aksi Perubahan, pada tanggal 17 Juni 2025 telah diselenggarakan Rapat Rencana Pengembangan Fitur untuk aplikasi SINDAK. Rapat ini menjadi forum strategis yang mempertemukan pihak teknis, yang diwakili oleh Pranata Komputer, dengan pihak pengguna yang diwakili oleh tim kelembagaan. Tujuan utama dari pertemuan ini adalah untuk merumuskan dan menyepakati linimasa (timeline) pengembangan yang realistis untuk diimplementasikan bersama tim pengembang (developer). Untuk mencapai tujuan tersebut, diskusi difokuskan pada pemetaan dan analisis terhadap berbagai usulan fitur baru serta kebutuhan penyempurnaan sistem yang ada. Melalui dialog yang konstruktif antara tim teknis dan tim kelembagaan, berhasil dicapai sebuah keputusan konkret yang menjadi hasil utama dari rapat ini, yaitu pengembangan workflow yang memudahkan user. Prioritas ini disusun berdasarkan urgensi kebutuhan layanan dari sisi kelembagaan, dampak fungsional terhadap optimalisasi layanan, dan estimasi tingkat kompleksitas pengerjaan teknis.

Dengan ditetapkannya daftar prioritas ini, penyusunan timeline pengembangan menjadi lebih terarah dan akuntabel. Rencana kerja yang dihasilkan dari rapat ini akan menjadi panduan resmi bagi tim developer dalam melaksanakan tahapan pengembangan selanjutnya, memastikan bahwa setiap sumber daya yang dialokasikan dapat memberikan hasil yang paling optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Aksi Perubahan.

Rapat rencana pengembangan fitur dalam aplikasi SINDAK



Gambar 7.



Gambar 8.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kSuuyEZBQgcSiLFHKgju2NQi6WT_L8jZl/edit?gid=1638412287#gid=1638412287

Capaian Minggu 5

Memasuki minggu kelima pelaksanaan implementasi aksi perubahan, fokus kegiatan dialihkan pada pengujian dan validasi sistem secara mendalam. Menindaklanjuti pengembangan fitur yang telah dilakukan, sebuah sesi ujicoba internal untuk modul “Penerbitan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen (SPKK)” di aplikasi SINDAK telah dilaksanakan secara intensif di kantor. Kegiatan ini merupakan wujud kolaborasi sinergis yang melibatkan tim kurikulum dan tim kelembagaan sebagai representasi pengguna utama dan pemilik data. Tujuan utama dari ujicoba internal ini adalah untuk memastikan aplikasi telah berfungsi secara optimal dan layak untuk

disosialisasikan kepada pengguna akhir. Selama proses pengujian, tim berhasil mengidentifikasi beberapa area krusial untuk penyempurnaan, yang langsung ditindaklanjuti dengan perbaikan sebagai berikut:

Evaluasi dan Perbaikan Formulir Validasi: Dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap formulir data input. Perbaikan difokuskan untuk meningkatkan akurasi data, mencegah potensi kesalahan input, dan memastikan alur pengisian lebih efisien bagi pengguna. **Penambahan Kolom Surat Keputusan (SK):** Salah satu terobosan penting adalah penambahan kolom khusus untuk “Surat Keputusan (SK)”. Penambahan ini bersifat strategis karena akan mempercepat proses verifikasi yang dilakukan oleh tim analis hukum. Dengan data SK yang terstruktur, proses validasi legalitas menjadi lebih cepat dan izin yang telah terbit dapat segera didistribusikan kepada pemohon. **Integrasi Database dari Admin Kelembagaan:** Untuk menjamin validitas dan konsistensi data, sistem kini terintegrasi dengan database yang dikelola oleh admin kelembagaan. Langkah ini krusial untuk mempercepat proses verifikasi dengan menyediakan data pembanding yang sah dan terpusat, sehingga mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk validasi manual. Serangkaian penyempurnaan teknis tersebut berhasil diselesaikan dalam periode minggu kelima. Hasil dari ujicoba ini menegaskan bahwa fungsionalitas utama sistem telah berjalan stabil dan sesuai dengan kebutuhan layanan. Dengan demikian, aplikasi SINDAK dinyatakan siap untuk memasuki tahapan selanjutnya. Sebagai tindak lanjut dari keberhasilan ujicoba internal ini, langkah strategis berikutnya adalah merancang dan melaksanakan sosialisasi kepada para guru dan penyelenggara Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen (SPKK) di lapangan.

Uji coba internal fitur izin penyelenggaraan SPKK di aplikasi SINDAK



Gambar 9.



Gambar 10.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kSuuyEZBQgcSiLFHKgju2NQi6WT_L8jZl/edit?gid=1060603347#gid=1060603347

Capaian Minggu ke 6

Memasuki minggu keenam, pada tanggal 1-3 Juli 2025, setelah fitur perizinan SPKK selesai dikembangkan oleh tim teknis, sekarang adalah waktunya untuk diuji coba secara internal. Tujuannya sederhana, memastikan fitur ini tidak hanya berfungsi, tetapi juga benar-benar mudah digunakan oleh siapa pun nantinya. Untuk mencapai tujuan tersebut, sesi uji coba ini dirancang sebagai implementasi nyata dari nilai Kolaboratif. Kegiatan ini tidak dipandang sebagai tugas teknis semata yang hanya menjadi tanggung jawab pengembang (Prakom). Sebaliknya, sebuah ruang kontribusi sengaja dibuka selebar-lebarnya dengan mengundang seluruh anggota Tim Efektif untuk ikut serta secara aktif. Inilah wujud dari upaya membangun kerja sama yang sinergis: tim teknis

membawa keahliannya, sementara Tim Efektif membawa perspektif krusial dari sisi pengguna. Dengan menyatukan kedua sudut pandang ini, terciptalah sinergi untuk mencapai tujuan bersama, yaitu sebuah fitur yang tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga benar-benar nyaman dan mudah digunakan. Dalam sesi ini, setiap anggota Tim Efektif diminta untuk mencoba langsung fitur baru tersebut. Mereka berperan ganda: pertama, sebagai pihak sekolah (SPKK) yang mengajukan permohonan izin, dan kedua, sebagai verifikator yang memeriksa dan memproses permohonan tersebut. Dengan mencoba dari dua sudut pandang yang berbeda, tim bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Mereka fokus melaporkan bagaimana pengalaman penggunaannya, terutama dari segi kemudahan penggunaan pada setiap langkahnya.

Masukan yang diberikan oleh Tim Efektif sangat berharga. Terjadi sinergi yang luar biasa antara tim pengguna dan tim teknis. Tim Efektif menyampaikan apa yang dirasa kurang praktis atau membingungkan, sementara Pengembang (Prakom) mendengarkan dan langsung memikirkan solusinya. Proses ini benar-benar membuka ruang diskusi di mana ide-ide untuk perbaikan bisa muncul demi mencapai tujuan bersama. Hasil dari kerja sama selama tiga hari ini sangat konkret. Beberapa kendala kecil atau bug yang terkait dengan alur penggunaan berhasil ditemukan. Tim pengembang pun segera melakukan perbaikan berdasarkan masukan tersebut. Output utamanya adalah sebuah fitur perizinan SPKK yang telah disempurnakan, menjadi lebih stabil, dan yang terpenting, terbukti lebih mudah dioperasikan baik oleh pemohon maupun oleh verifikator. Berkat kerja sama tim yang solid, fitur ini sekarang jauh lebih siap untuk nantinya diperkenalkan kepada pengguna yang sesungguhnya.

Melakukan ujicoba internal fitur perizinan SPKK dan melakukan perbaikan bug atau error hasil ujicoba



Gambar 11.



Gambar 12.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kSuuyEZBQgcSiLFHKgju2NQi6WT_L8jZl/edit?gid=364814537#gid=364814537

Capain Minggu ke-7

Setelah melalui serangkaian tahap pengembangan dan uji coba, Aksi Perubahan memasuki fase penting yaitu sosialisasi. Pada tanggal 9 Juli 2025, bertempat di kantor pusat Kementerian Agama, Thamrin, diselenggarakan sesi sosialisasi internal optimalisasi SINDAK. Kegiatan ini secara khusus ditujukan kepada seluruh jajaran pegawai di lingkungan Subdirektorat Pendidikan Menengah, dengan harapan utama agar mereka mengetahui dan memahami program yang sedang berjalan. Acara ini dirancang dengan format yang interaktif, bukan sekadar presentasi satu arah. Puncak dari sosialisasi ini adalah dilakukannya demo langsung (live demo) dari fitur baru layanan perizinan SPKK. Melalui demo ini, para pegawai dapat melihat secara nyata bagaimana alur kerja pengajuan izin akan bertransformasi menjadi lebih efisien dan transparan melalui

platform digital yang baru. Sesi kemudian dilanjutkan dengan diskusi yang sangat produktif, di mana dibuka kesempatan untuk tanya jawab dan penyampaian saran. Antusiasme peserta terlihat jelas dari berbagai pertanyaan dan masukan yang diberikan. Salah satu tanggapan yang paling menonjol dan dianggap sangat relevan oleh tim proyek adalah saran dari peserta agar ke depannya disediakan tutorial penggunaan aplikasi bagi pengguna akhir, yaitu pihak sekolah. Sosialisasi ini berhasil mencapai tujuannya. Output utama adalah tersosialisasikannya platform izin penyelenggaraan SPKK secara menyeluruh kepada tim internal. Lebih dari itu, masukan berharga yang diterima, terutama mengenai pembuatan tutorial, akan menjadi agenda tindak lanjut yang akan digarap oleh tim. Dengan demikian, seluruh pegawai di Subdirektorat Pendidikan Menengah kini memiliki pemahaman yang sama dan siap mendukung implementasi penuh dari program optimalisasi SINDAK ini.

Melakukan ujicoba internal fitur perizinan SPKK dan melakukan perbaikan bug atau error hasil ujicoba



Gambar 13.



Gambar 14.

https://www.instagram.com/p/DMHJaVezZsp/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MWR5NzNwaDI3dnE3Zg==

<https://bimaskristen.kemenag.go.id/news-1400-digitalisasi-layanan-penerbitan-izin-penyelenggaraan-spkk-bimas-kristen-gelar-sosialisasi-internal.html>

Capaian Minggu ke-8

Sebagai bagian dari tahapan sosialisasi Aksi Perubahan, pada tanggal 16 Juli 2025, diselenggarakan kegiatan Sosialisasi Nasional Optimalisasi Aplikasi SINDAK. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom untuk dapat menjangkau seluruh Kepala Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen (SPKK) se-Indonesia. Tujuan utama dari sosialisasi ini adalah untuk memperkenalkan upaya modernisasi layanan pendidikan keagamaan yang digagas. Sesi ini difokuskan pada demo langsung aplikasi. Melalui demo tersebut, ditunjukkan kepada para peserta bagaimana platform perizinan SPKK yang baru dapat menyederhanakan proses pengajuan dan perpanjangan izin. Pesan yang ditekankan adalah bahwa inovasi ini dirancang untuk memberikan kemudahan, efektivitas, dan transparansi bagi para pengguna akhir. Tanggapan yang diterima dari para peserta sangat positif. Sebagian besar peserta, terutama para Kepala SPKK, menyambut dengan antusias dan menyatakan dukungan penuh. Mereka memandang aplikasi ini sebagai solusi yang akan sangat mempermudah proses administrasi perizinan yang selama ini dijalani. Pada sesi tanya jawab yang dibuka, muncul satu masukan yang sangat konstruktif. Para peserta menyarankan agar disediakan satu narahubung atau PIC (Point of Contact) khusus sebagai pusat bantuan jika terjadi kendala teknis. Saran ini dicatat oleh tim proyek sebagai tindak lanjut yang akan diprioritaskan dalam persiapan implementasi. Kegiatan sosialisasi ini menjadi langkah krusial dalam mempersiapkan seluruh pemangku kepentingan sebelum layanan digital ini diberlakukan secara resmi pada tahun 2026.

**Melakukan sosialisai Optimalisasi SINDAK dalam kepada Kabid/
Pembimas se Indonesia dan Kepala SPKK se Indonesia**



Gambar 15.



Gambar 16.

https://www.instagram.com/reel/DMMN_Xov7bE/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=aWw0YjN4dDg0ZzE5

2. Manfaat Aksi Perubahan

Aksi perubahan yang digagas melalui optimalisasi Sistem Informasi Data Agama Kristen (SINDAK) dalam kaitannya dengan layanan perizinan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen (SPKK) merupakan langkah strategis yang tidak hanya menyentuh aspek administratif, tetapi juga menyentuh nilai-nilai transformasi birokrasi, pelayanan publik, dan penguatan kapasitas kelembagaan secara menyeluruh. Manfaat dari transformasi ini dapat dibagi ke dalam dua spektrum utama, yakni manfaat internal yang dirasakan langsung oleh organisasi dan aparatur, serta manfaat eksternal yang dirasakan oleh masyarakat sebagai penerima layanan.

a. Manfaat Internal

1. Peningkatan Kapasitas, Kualitas, dan Profesionalisme ASN

Dengan hadirnya sistem informasi terintegrasi seperti SINDAK, aparatur sipil negara (ASN) dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan perubahan digitalisasi administrasi. Hal ini menciptakan ruang pembelajaran dan pengembangan keterampilan baru, mulai dari penguasaan teknologi,

pemahaman terhadap tata kelola data elektronik, hingga peningkatan akurasi dalam proses verifikasi dan validasi data SPKK. Pengalaman dalam mengelola sistem ini melahirkan profesionalisme baru dalam budaya kerja ASN, di mana kecepatan, ketepatan, dan keandalan menjadi standar baru yang diterapkan dalam setiap layanan. Pegawai tidak lagi hanya menjalankan prosedur, melainkan menjadi fasilitator layanan publik yang berpikir sistematis dan adaptif terhadap perubahan.

2. Penguatan Tata Kelola, Koordinasi, dan Sinergi Lintas Unit

SINDAK berperan penting dalam mendorong penguatan koordinasi antarunit, terutama antara Bidang Urusan Agama Kristen di tingkat Kanwil dengan satuan kerja keagamaan Kristen di kabupaten/kota. Sistem ini mendukung adanya alur komunikasi dan kerja yang lebih jelas, terdokumentasi, serta terstandar, sehingga mengurangi kemungkinan tumpang tindih informasi maupun keterlambatan dalam proses pengambilan keputusan. Melalui sistem ini pula, mekanisme supervisi dan evaluasi menjadi lebih mudah dilakukan karena data terekam secara digital dan bisa diakses oleh unit-unit yang berkepentingan. Tata kelola pelayanan publik yang transparan dan kolaboratif ini memperkuat fondasi birokrasi yang sehat dan responsif.

3. Meningkatkan Kredibilitas, Transparansi, dan Citra Lembaga

Transformasi digital melalui SINDAK berdampak signifikan terhadap persepsi masyarakat terhadap institusi pemerintah. Ketika layanan publik berjalan cepat, prosedur mudah dipahami, dan hasil layanan bisa dipantau secara real-time, maka kepercayaan publik akan tumbuh secara alami. Lembaga keagamaan Kristen sebagai pemohon izin akan merasa dihargai dan dilayani secara setara, tanpa adanya praktik birokrasi berbelit-belit. Ini menciptakan citra baru Kementerian Agama sebagai institusi yang modern, terbuka terhadap inovasi, dan serius dalam melayani umat secara adil dan inklusif. Keberhasilan membangun kredibilitas ini juga menjadi modal penting dalam mewujudkan transformasi kelembagaan jangka panjang.

b. Manfaat Eksternal

1. Kemudahan Akses Layanan dan Kepastian Prosedur bagi Masyarakat

Dari sisi pengguna layanan, hadirnya sistem SINDAK sangat membantu dalam memangkas waktu dan biaya. Lembaga keagamaan Kristen yang sebelumnya harus menempuh prosedur manual dan menghadapi ketidakpastian dalam waktu penyelesaian layanan, kini dapat mengakses informasi secara daring, mengunggah dokumen, serta memantau status izin mereka dengan mudah. Ini memberikan kenyamanan tersendiri serta meningkatkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan. Masyarakat tidak lagi harus datang langsung ke kantor, cukup melalui jaringan internet dan perangkat digital, seluruh proses perizinan dapat dikawal secara mandiri dan terbuka.

2. Penguatan Data Keagamaan yang Terstandar dan Valid

Salah satu kekuatan utama sistem ini adalah kemampuannya dalam mengelola data SPKK secara nasional secara sistematis. Data yang sebelumnya tersebar dalam berbagai dokumen fisik atau basis lokal kini dihimpun dalam satu sistem nasional yang terstandar. Hal ini memberikan dampak besar dalam perencanaan program keagamaan, alokasi anggaran, pemetaan kebutuhan lembaga, hingga pelaporan yang akurat. Pemerintah pun memiliki landasan yang kuat dan sah dalam merumuskan kebijakan berbasis data (*data-driven policy*), yang pada akhirnya memberikan pelayanan yang lebih tepat sasaran dan efisien.

3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Inovasi Sosial

Dalam jangka panjang, sistem ini turut membuka ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat. Karena bersifat terbuka dan akuntabel, masyarakat memiliki akses terhadap informasi layanan dan proses yang berjalan, sehingga memungkinkan keterlibatan aktif dalam memberikan masukan, kritik, maupun usulan perbaikan. Ini menciptakan relasi sosial yang sehat antara pemerintah dan warga, di mana kebijakan tidak lagi bersifat top-down, tetapi tumbuh dari proses partisipatif yang inklusif. Tak hanya itu, lembaga-lembaga keagamaan lokal juga terdorong untuk berinovasi, mengembangkan program-program

pendidikan dan pembinaan yang kontekstual, dan didukung oleh sistem perizinan yang mudah diakses dan responsif.

Secara keseluruhan, aksi perubahan melalui optimalisasi SINDAK bukan sekadar langkah administratif, melainkan wujud nyata dari reformasi pelayanan publik yang menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai pusat perhatian. Ia memperkuat pondasi internal birokrasi, mendorong efisiensi dan kolaborasi, sekaligus memperluas dampak pelayanan yang adil dan merata bagi masyarakat luas, khususnya umat Kristen yang ingin menyelenggarakan pendidikan keagamaan secara sah dan profesional.

3. Implementasi Pengembangan Kompetensi Dalam Aksi Perubahan

No	Komponen / Sub Komponen	Kegiatan Aksi Perubahan	Pengembangan Mandiri	Pengembangan melalui Penugasan
1	Integritas: Pengambilan Keputusan Dilematis	Menyusun dan mengevaluasi sistem pelayanan izin SPKK agar transparan dan tepat guna	- Mendalami kebijakan terkait pelayanan SPKK dan memahami urgensinya dalam konteks pelayanan publik- Mengambil keputusan berbasis data dan kebutuhan riil pemohon izin- Menimbang dampak dari setiap keputusan demi memastikan manfaat yang lebih luas	- Dilibatkan dalam proses validasi dan finalisasi keputusan teknis dalam pengembangan fitur baru SINDAK- Diberi tanggung jawab untuk memutuskan alur pelayanan yang efisien dan dapat dipertanggungjawabkan
2	Kerjasama: Kerjasama Eksternal	Melakukan koordinasi aktif SPKK, yayasan,	- Menjalin komunikasi terbuka dengan pimpinan	- Terlibat dalam forum koordinasi antara Kanwil, Kab/Kota, serta

		dan pemangku kepentingan lainnya	SPKK, Yayasan, Kabid/Pembimas Kanwil Kemenag, Kepala Seksi/Penyelenggara Kabupaten/kota dan instansi terkait, memastikan layanan ijin berproses	lembaga pemohon untuk menyamakan pemahaman terkait penggunaan sistem dan mekanisme penerbitan izin
3	Mengelola Perubahan: Pengembangan Diri & Orang Lain	Sosialisasi penggunaan fitur baru SINDAK serta pendampingan teknis kepada operator dan pemohon izin	- Meningkatkan kapasitas diri melalui eksplorasi mandiri sistem informasi dan regulasi SPKK- Mendampingi dan membina petugas/operator di daerah agar mampu mengoperasikan sistem dengan lancar	- Turut menjadi narasumber dalam kegiatan bimtek dan sosialisasi SPKK berbasis SINDAK yang diselenggarakan oleh Kanwil maupun Ditjen Bimas Kristen
4	Mengelola Perubahan: Orientasi pada Hasil	Merancang alur layanan SPKK digital yang efisien serta menetapkan indikator keberhasilan implementasinya	- Menyusun perencanaan kerja berdasarkan analisis kebutuhan dan risiko- Fokus pada pencapaian target pelayanan izin yang cepat, transparan, dan akuntabel	- Diberi mandat untuk memastikan layanan SPKK dapat berjalan sesuai timeline dan mencapai target penyelesaian sesuai dengan standar layanan publik

E. KEBERLANJUTAN AKSI

Keberlanjutan aksi perubahan merupakan salah satu aspek paling penting dalam siklus manajemen perubahan di lingkungan birokrasi, khususnya di instansi pemerintah. Tanpa adanya perencanaan keberlanjutan yang matang, sebuah aksi perubahan akan berhenti sebagai proyek jangka pendek yang kehilangan dampaknya seiring dengan berlalunya waktu. Aksi perubahan ini muncul dari latar belakang kebutuhan yang nyata di lapangan yaitu pengajuan dan penebitan izin penyelenggaraan yang bersifat manual tidak efektif, efisien dan tidak transparan. Oleh karena itu, layanan berbasis teknologi digital dipilih sebagai inovasi utama. Akan tetapi, keberhasilan solusi digital ini tentu harus dijamin melalui kesinambungan dan pengembangan berkelanjutan baik dari sisi sistem, sumber daya, kelembagaan, maupun komitmen pengelolaan jangka panjang.

1. Integrasi Program dalam Sistem Organisasi

Langkah pertama dalam menjamin keberlanjutan program adalah dengan mengintegrasikan inovasi ini ke dalam sistem kerja organisasi secara formal. Dalam hal ini, Fitur penerbitan izin telah dikembangkan dalam Aplikasi SINDAK untuk digunakan oleh SPKK yang akan mengajukan permohonan izin penyelenggaraan SPKK. Hal ini telah dimulai dengan sosialisasi secara internal dan eksternal dan pembuatan video tutorial yang diakses melalui website resmi instansi. Dalam jangka panjang, sistem ini akan dikembangkan dan diintegrasikan dengan Pusdatin. Pentingnya integrasi ini juga ditandai dengan adanya komitmen kelembagaan, termasuk dukungan dari unsur Pimpinan di Ditjen Bimas Kristen. Dan Tim Efektif yang dibentuk, tim ini telah dilibatkan sejak awal pada tahap rencana pengembangan, penambahan fitur dan produksi video, serta memperoleh pelatihan teknis dan pendampingan dari coach dan mentor selama masa pelaksanaan aksi perubahan. Selain itu, dilakukan pula transfer pengetahuan (knowledge transfer) kepada ASN muda agar keberlangsungan pengelolaan tidak hanya bertumpu pada satu dua orang, tetapi menjadi tanggung jawab bersama yang terus diturunkan antar generasi. Proses regenerasi juga dilandasi dengan prinsip berbagi praktik baik (sharing best practice), di mana anggota tim pengelola berkomitmen untuk mentransfer pengetahuan ke ASN

lainnya melalui kegiatan bimtek internal yang dirancang secara berkala. Dengan demikian, kapasitas SDM akan terus meningkat, bahkan setelah masa tugas peserta PKA selesai

3. Keberlanjutan aksi dapat dilanjutkan dengan rencana Jangka Menengah dan Panjang.

Melalui pelaksanaan aksi perubahan selama fase implementasi kepemimpinan, dapat disimpulkan bahwa program ini memungkinkan untuk diwujudkan secara nyata guna mencapai hasil (output) yang telah ditetapkan dalam milestone jangka menengah maupun jangka panjang.

No	Ruang Lingkup	Tahapan/Milestone (Rincian Kegiatan)	Target Waktu	Hasil/Capaian/Bukti Fisik
1	2	3	4	5
	Jangka Menengah	6 Bulan-1 Tahun		
1.	Melaksanakan Sosialisasi Ke semua SPKK Tingkat dasar dan Menengah	Menyusun materi sosialisasi, mengirim undangan, menggelar pertemuan daring/luring, serta menyebarkan panduan dan video tutorial penggunaan aplikasi SINDAK.	Agustus s.d. september 2025	- Surat Undangan panduan Video tutorial
2.	Implementasi layanan penerbitan izin penyelenggaraan	Aktivasi fitur perizinan pada aplikasi SINDAK, pelatihan operator	Oktober s.d November 2025	- layanan Penerbitan izin Digital

	SPKK tingkat Dasar dan Menengah melalui aplikasi SINDAK	SPKK, serta pelaksanaan layanan izin secara digital oleh pengguna.		
3.	Melaksanakan Monitoring dan evaluasi aplikasi untuk menentukan fitur apa saja yang sudah sesuai, fitur apa saja yang perlu di tambahkan kedalam aplikasi dan identifikasi error pada aplikasi	Menyusun instrumen evaluasi, mengumpulkan feedback dari pengguna, melakukan uji coba, serta mendokumentasikan hasil evaluasi aplikasi.	Desember 2025 s.d Januari 2026	- Laporan Hasil Pelaksanaan - Hambatan Rekomendasi perbaikan
4.	Malakukan perbaikan berdasarkan Hasil Evaluasi	Koordinasi dengan tim IT, perbaikan teknis sistem, pembaruan fitur, serta pengujian ulang aplikasi pasca perbaikan.	Desember 2025 s.d Januari 2026	- Laporan Hasil Kegiatan
	Jangka panjang	Lebih dari 1 Tahun		
1.	Melaksanakan rapat-rapat koordinasi untuk mengevaluasi aplikasi secara periodik	Rapat ini dilakukan secara berkala untuk membahas bagaimana aplikasi digunakan, apa saja kendala yang dihadapi, serta	>2025	- Undangan - Notulen - Dokumentasi

		menyusun langkah-langkah perbaikan dan pengembangan ke depan.		
2.	Mengintergrasikan layanan ini pada pusdatin	Kegiatan ini mencakup upaya untuk menyambungkan aplikasi SINDAK ke sistem Pusdatin agar data lebih terpusat dan bisa diakses lintas unit. Perlu koordinasi teknis dan uji coba sistem secara menyeluruh.	>2026	- Dokumentasu - Implementasi
3.	Mengembangkan Aplikasi secara Terus menerus	Pengembangan ini sifatnya berkelanjutan. Tim akan mengumpulkan masukan dari pengguna, menambahkan fitur baru jika diperlukan, serta memperbaiki kekurangan yang ditemukan.	>2026	- Surat Undangan evaluasi kepada tim IT - Notulen - Dokumentasi

F. KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN

No	Judul Aksi Perubahan	Mata Pelatihan	Jalur Pembelajaran	Hubungan dengan Aksi Perubahan	Sumber Pembelajaran
1	Optimalisasi sistem Informasi data agama Kristen (SINDAK) melalui integrasi layanan penerbitan Izin Penyelenggaraan satuan Pendidikan Keagamaan Kristen	Membina Kerja Sama Tim	Belajar melalui kerja lintas unit, tugas proyek bersama, forum komunikasi aktif, serta refleksi tim atas hasil kerja kolaboratif.	Kerja sama tim diperlukan untuk menyatukan berbagai bagian dalam proses integrasi sistem yang bersifat lintas fungsi.	Modul pelatihan kolaborasi, dokumentasi kerja tim, hasil lokakarya, dan pengalaman implementasi tim proyek.
2	Optimalisasi sistem Informasi data agama Kristen (SINDAK) melalui integrasi layanan penerbitan Izin Penyelenggaraan satuan Pendidikan Keagamaan Kristen	Mengaktifkan Transformasi Digital di Sektor Pemerintahan	Pembelajaran dilakukan melalui benchmark praktik baik, diskusi virtual lintas instansi, serta penerapan langsung digitalisasi layanan.	Aksi perubahan ini merupakan bentuk transformasi digital di sektor pelayanan publik, sehingga pelatihan ini memberi arah dan pemahaman praktis.	Materi pelatihan transformasi digital, dokumentasi kebijakan pemerintah, dan praktik instansi digital lainnya.
3	Optimalisasi sistem Informasi data agama Kristen (SINDAK) melalui integrasi layanan penerbitan Izin Penyelenggaraan satuan Pendidikan Keagamaan Kristen	Keterampilan Digital dalam Menyusun Kebijakan	Lokakarya teknis, praktik langsung penyusunan kebijakan digital, dan pembelajaran kolaboratif dengan pendekatan studi kasus.	Kebijakan yang dihasilkan dari proses digitalisasi seperti SINDAK membutuhkan kompetensi teknis dan logika sistem berbasis data.	Materi lokakarya penyusunan kebijakan digital, contoh kebijakan sektor publik, serta pedoman ASN Future Skills.

G. DISEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN

Dalam mendukung keberhasilan implementasi aksi perubahan bertajuk *“Optimalisasi Sistem Informasi Data Agama Kristen (SINDAK) melalui Integrasi Layanan Penerbitan Izin Penyelenggaraan SPKK”*, kemampuan peserta dalam menyusun strategi komunikasi dan membangun dukungan dari para pemangku kepentingan menjadi aspek yang sangat penting. Hal ini mencerminkan keterampilan dalam mendesain pendekatan diseminasi yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan audiens yang beragam.

1. Strategi komunikasi

yang digunakan mencakup pemanfaatan berbagai saluran informasi, baik media konvensional maupun digital, untuk menyampaikan substansi aksi perubahan kepada stakeholder terkait. Upaya diseminasi dilakukan secara terarah dan dikemas secara visual menarik dengan branding yang konsisten agar dapat menjangkau seluruh pihak yang terdampak, mulai dari internal unit kerja hingga mitra eksternal. Pemilihan media komunikasi yang tepat menjadi faktor penentu dalam efektivitas penyampaian pesan. Dalam konteks kelembagaan, pendekatan komunikasi vertikal ke atas seperti laporan, notulensi, dan proposal digunakan untuk menyampaikan perkembangan program kepada pimpinan atau pihak pengambil kebijakan. Sementara itu, komunikasi vertikal ke bawah dilakukan melalui edaran resmi, rapat koordinasi, forum sosialisasi, maupun kanal digital seperti platform e-office atau media sosial institusi. Kemampuan peserta dalam memetakan audiens dan menyesuaikan saluran komunikasi sesuai dengan karakteristik penerima pesan menunjukkan adanya sensitivitas organisasi serta profesionalisme dalam mengelola perubahan. Tidak hanya itu, komunikasi lintas sektor dan pendekatan berbasis partisipasi turut membuka ruang dialog yang memperkuat legitimasi aksi perubahan dan mendorong partisipasi aktif dari seluruh stakeholder. Dengan penerapan strategi komunikasi yang adaptif dan berbasis kolaborasi ini, peserta mampu mendapat dukungan yang luas terhadap program integrasi sistem SPKK ke dalam SINDAK sebagai

bagian dari transformasi digital layanan pendidikan keagamaan Kristen yang lebih efisien dan transparan.

Evident Link Publikasi :

<https://bimaskristen.kemenag.go.id/news-1400-digitalisasi-layanan-penerbitan-izin-penyelenggaraan-spkk-bimas-kristen-gelar-sosialisasi-internal.html>



https://www.instagram.com/reel/DMMN_Xov7bE/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=aWw0YjN4dDg0ZzE5 (Website Bimas Kristen)



https://www.instagram.com/p/DMHJaVezZsp/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MWR5NzNwaDI3dnE3Zg==



https://drive.google.com/file/d/1F4Nj1Znwz1orTJMJM50ymXyXAAtCfh1Fp/view?usp=drive_link



2. Strategi Membangun Dukungan dan Replikasi Aksi Perubahan

Keberhasilan dalam mendorong adopsi dan replikasi aksi perubahan tidak terlepas dari penerapan strategi komunikasi dan koordinasi yang efektif. Dalam konteks penguatan layanan digital berbasis SINDAK di lingkungan Direktorat Pendidikan Ditjen Bimas Kristen, pendekatan yang digunakan meliputi komitmen pimpinan, keterlibatan lintas unit, publikasi yang terstruktur, serta kedisiplinan dalam implementasi. Terdapat tiga faktor kunci keberhasilan (Key Success Factors/KSF) yang menjadi penopang utama dalam pelaksanaan dan penerimaan aksi perubahan ini:

a. Kepemimpinan yang Mendorong Gerakan Perubahan

Peran pemimpin sebagai penggerak perubahan sangat penting dalam menciptakan budaya kerja yang melayani dan proaktif. Dalam hal ini, pemimpin tidak hanya menjadi pengarah, tetapi juga menjadi fasilitator kolaborasi antara tim internal dan mitra eksternal. Dengan mengedepankan komunikasi yang terbuka dan motivasi yang kuat, pimpinan berhasil membangun keselarasan gerak tim untuk mendukung proses integrasi layanan SPKK ke dalam platform SINDAK.

b. Kompetensi dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Transformasi sistem digital membutuhkan SDM yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas dan akuntabilitas dalam bekerja. Berbagai program peningkatan kapasitas seperti pelatihan, bimbingan teknis, dan workshop telah dioptimalkan untuk mendukung pengembangan pegawai, baik di tingkat pusat maupun daerah. Peningkatan kapasitas ini menjadi dasar yang kokoh dalam mendukung kelangsungan dan replikasi aksi perubahan ke depan.

c. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Efektivitas Layanan

Pemanfaatan platform digital menjadi elemen penting dalam mempercepat penyebaran informasi serta menghubungkan berbagai pemangku kepentingan dalam satu sistem yang terintegrasi. Dalam implementasi program ini, berbagai kanal komunikasi seperti website internal, media sosial resmi (Instagram, Facebook), dan sistem manajemen informasi digunakan untuk mendukung diseminasi informasi layanan SPKK berbasis SINDAK. Hal ini memperluas jangkauan publikasi dan memperkuat kesadaran serta partisipasi masyarakat terhadap layanan digital Ditjen Bimas Kristen.

Dengan mengintegrasikan kepemimpinan yang visioner, SDM yang kompeten, dan teknologi yang adaptif, aksi perubahan ini mendapatkan respon positif dari stakeholders dan berpeluang besar untuk direplikasi secara nasional dalam penguatan sistem layanan pendidikan keagamaan Kristen.

H. PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

Pelaksanaan pengembangan potensi diri dalam aksi perubahan Optimalisasi SINDAK dalam integrasi layanan penerbitan izin penyelenggaraan Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen (SPKK) merupakan bagian penting dari proses transformasi kepemimpinan peserta pelatihan. Sebagai pejabat administrator, peserta tidak hanya dituntut menjadi agen perubahan dalam organisasi, tetapi juga wajib mengembangkan kompetensi diri secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa kepemimpinannya efektif, adaptif, dan memberi dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan publik. Pengembangan potensi diri dilakukan melalui proses sistematis yang telah dirancang sejak tahap penyusunan rancangan aksi perubahan. Proses tersebut mencakup pemetaan kompetensi awal, identifikasi gap kompetensi, penetapan strategi pengembangan, serta pelaksanaan dan evaluasi kegiatan peningkatan kapasitas diri yang relevan dengan tujuan aksi perubahan.

1. Pemetaan sikap dan perilaku Langkah pertama yang dilakukan adalah pemetaan sikap dan perilaku sebagai pejabat administrator berdasarkan standar kompetensi jabatan. Pemetaan ini mencakup kompetensi manajerial,

teknis, dan sosial kultural. Dalam proses ini, peserta menyadari adanya beberapa area yang perlu diperkuat, antara lain:

- a. Kemampuan dalam mengelola tim kerja lintas fungsi secara kolaboratif.
 - b. Keterampilan komunikasi, khususnya terkait penyampaian gagasan perubahan kepada pihak eksternal maupun internal
 - c. Literasi digital melalui
 - d. Kecakapan merancang inovasi pelayanan berbasis data dan kebutuhan pengguna.
2. Strategi dan metode pengembangan diri Dalam mengembangkan potensi diri, peserta mengimplementasikan beberapa strategi yang telah dirancang, antara lain:
- a. Pembelajaran mandiri melalui literatur kepemimpinan, buku manajemen inovasi pelayanan publik, serta modul-modul pelatihan berbasis digital yang relevan dengan pengelolaan layanan berbasis teknologi.
 - b. Konsultasi dan bimbingan dengan mentor, dilakukan secara berkala untuk mendapatkan umpan balik dan refleksi terhadap proses pelaksanaan aksi perubahan maupun penguatan kapasitas kepemimpinan pribadi.
 - c. Partisipasi aktif dalam forum pembelajaran kolektif seperti kelas diskusi PKA, simulasi kepemimpinan, dan studi kasus inovasi layanan publik.
 - d. Belajar dari proses memimpin perubahan melalui pengalaman membangun tim, menjalin komunikasi dengan stakeholder, mengelola proyek digital, serta menangani tantangan-tantangan riil dalam implementasi program.
3. Peningkatan kompetensi dalam proses implementasi Pelaksanaan pengembangan potensi diri menunjukkan hasil nyata dalam peningkatan kemampuan peserta pada beberapa aspek penting, seperti:
- a. Kepemimpinan kolaboratif, terbukti dari keberhasilan dalam membentuk tim efektif lintas fungsi, yang terdiri dari ASN Jabatan Fungsional Tertentu (Analisis SDMA, Perencana, Prakom, Statistisi, Arsipais) maupun Jabatan Pelaksana untuk mengelola platform manasik haji digital.

- b. Kompetensi komunikasi strategis, terlihat dari keberhasilan menyusun narasi aksi perubahan dan menyampaikannya dalam forum formal seperti seminar rancangan, rapat tim, serta diseminasi kepada stakeholder.
 - c. Penguasaan dasar teknologi pembelajaran, dibuktikan melalui kemampuan dalam mengembangkan fitur, membuat video tutorial, serta mengarahkan layanan terintegrasi di SINDAK.
 - d. Kemampuan reflektif dan adaptif, ditunjukkan dalam merespons umpan balik dari mentor dan stakeholder, lalu melakukan evaluasi dan perbaikan fitur
4. Perbandingan kondisi awal dan hasil pengembangan Dengan membandingkan kondisi awal sebelum aksi perubahan dan kondisi setelah pelaksanaan aksi perubahan, terlihat adanya kemajuan yang signifikan. Kemajuan ini menjadi indikator bahwa strategi pengembangan potensi diri yang dilaksanakan berjalan efektif dan berdampak nyata terhadap peningkatan kompetensi kepemimpinan peserta, antara lain:
- a. Merancang fitur dan alur dalam SINDAK
 - b. Mengembangkannya dalam SINDAK sehingga layanan Perizinan penyelenggaraan SPKK terintegrasi
 - c. Melaksanakan sosialisasi kepada pihak eksternal dan internal

	Komponen / Subkomponen	Kegiatan Aksi Perubahan	Pengembangan Mandiri	Pengembangan Melalui Penugasan
1	Integritas (Pengambilan keputusan dilematis)	Implementasi an evaluasi OP integrasi yanan SPKK	- Menganalisis persoalan secara mendalam - Mengambil keputusan berdasarkan	- Terlibat dalam pekerjaan yang menuntut pengambilan keputusan

	Komponen / Subkomponen	Kegiatan Aksi Perubahan	Pengembangan Mandiri	Pengembangan Melalui Penugasan
			prinsip dan regulasi - Memprioritaskan manfaat yang lebih besar	cepat dan tepat - iberi tanggung jawab untuk mengambil keputusan dari tingkat teknis hingga strategis
2	Kerja Sama (Koordinasi eksternal)	Kolaborasi dengan para stakeholder SPKK	- Membangun komunikasi aktif dengan instansi dan mitra eksternal - Menjalin jejaring kelembagaan	- Dilibatkan dalam kegiatan yang melibatkan instansi luar dan lembaga keagamaan
3	Mengelola Perubahan (Pengembangan diri & orang lain)	Sosialisasi, uji coba, dan pelaksanaan wasdal sistem integrasi	- Meningkatkan kapasitas pribadi dalam transformasi digital - Mendorong pemberdayaan SDM SPKK	- Terlibat dalam pelatihan, bimtek, dan kegiatan penguatan kompetensi

	Komponen / Subkomponen	Kegiatan Aksi Perubahan	Pengembangan Mandiri	Pengembangan Melalui Penugasan
4	Mengelola Perubahan (Orientasi pada hasil)	Perencanaan strategis, manajemen risiko, dan evaluasi aksi perubahan	- Menyusun perencanaan kerja terukur dan efisien- - Menetapkan indikator hasil kegiatan	- Mendapatkan penugasan berbasis target capaian waktu dan kualitas output

I. PENUTUP

Perubahan dalam sistem pelayanan publik bukan sekadar soal inovasi digital, melainkan juga tentang keberanian untuk membuka ruang-ruang baru yang lebih transparan, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Melalui aksi perubahan ini, penulis menyadari bahwa optimalisasi SINDAK sebagai wadah pengelolaan data dan layanan penerbitan izin SPKK adalah langkah penting menuju birokrasi yang lebih lincah, responsif, dan terpercaya. Selama proses berlangsung, bukan hanya teknis dan sistem yang diperbaiki, tetapi juga kesadaran kolektif akan pentingnya pelayanan publik yang berkualitas. Mulai dari menyusun peta proses bisnis, membangun komunikasi lintas sektoral, mendampingi petugas teknis di lapangan, hingga menanamkan komitmen di antara para pemangku kepentingan semua dilalui dengan semangat kolaborasi dan kerja bersama.

Tantangan tentu ada, baik dari sisi sumber daya, adaptasi teknologi, maupun koordinasi kelembagaan. Namun, dari situ pula muncul pembelajaran berharga bahwa perubahan akan berhasil bila dijalankan dengan hati, bukan hanya strategi. Ke depan, besar harapan agar sistem yang telah dirintis ini terus disempurnakan dan direplikasi secara lebih luas di lingkungan Ditjen Bimas Kristen, bahkan di level nasional. SINDAK bukan hanya menjadi alat

administrasi, melainkan juga cerminan komitmen pelayanan yang bertumpu pada data, integritas, dan kepekaan terhadap kebutuhan umat. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dan mendukung proses ini. Semoga langkah kecil ini menjadi bagian dari kontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, dan melayani dengan sepenuh hati.

LAMPIRAN

Lampiran 1



Lampiran 2



Lampiran 3



Lampiran 4



Lampiran 5



Lampiran 6



Lampiran 7



Lampiran 8



5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 886);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG TIM RENCANA AKSI PERUBAHAN OPTIMALISASI SISTEM INFORMASI DATA AGAMA KRISTEN MELALUI INTEGRASI LAYANAN PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN KRISTEN.

KESATU : Menetapkan Tim Rencana Aksi Perubahan Optimalisasi Sistem Informasi Data Agama Kristen melalui Integrasi Layanan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Aksi Perubahan Optimalisasi Sistem Informasi Data Agama Kristen melalui Integrasi Layanan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen yaitu:

- a. Pembina melakukan pembinaan terhadap kinerja dan hasil kinerja dari Tim;
- b. Penanggung jawab melakukan pengawasan terhadap kinerja dan hasil kinerja dari Tim;
- c. Ketua bertugas memimpin kinerja Tim;
- d. Sekretaris membantu ketua dalam mempersiapkan dukungan administratif dari Tim; dan
- e. Anggota melaksanakan tugas tugas yang didisposisi oleh Ketua Tim.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Rencana Aksi Perubahan Optimalisasi Sistem Informasi Data Agama Kristen melalui Integrasi Layanan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Tim Rencana Aksi Perubahan Optimalisasi Sistem Informasi Data Agama Kristen melalui Integrasi Layanan Penerbitan Iain Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen sebagaimana dimaksud dalam Ditetun KESATU bertugas dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan terhitung mulai bulan Mei Tahun 2025 sampai dengan bulan Desember Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Juni 2025

DIREKTUR JENDERAL
HUBUNGAN MASYARAKAT KRISTEN,



[Signature]
REANE MARIE TULUNG

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
NOMOR 257 TAHUN 2025
TENTANG
TIM RENCANA AKSI PERUBAHAN
OPTIMALISASI SISTEM INFORMASI DATA
AGAMA KRISTEN MELALUI INTEGRASI
LAYANAN PENERBITAN IZIN
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
KEAGAMAAN KRISTEN

Pembina
Penanggung Jawab
Ketua
Sekretaris
Anggota

- : Jeane Marie Tulung
- : Sudirman Simanihuruk
- : Santi Yanti Kalangi
- : Riyani Putriardi
- : 1. Candra Nugroho
- : 2. Macareno Sendi Putra Yudiarto
- : 3. Sotia Providensia Hia
- : 4. Citra Nopranata Situmorang
- : 5. Melda Ery Rusmawi
- : 6. Evanglie Risje Miraicel Manarisip



DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

JEANE MARIE TULUNG

Lampiran 9

		LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Kepemimpinan dan Moderasi Beraqama BMBPSDM		PESERTA	
KARTU KENDALI PROSES COACHING PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN XVIII TAHUN 2025					
Nama Peserta :		Santi Yanti Kalangi		Nama Mentor : Dr. Suwarsono, S.PAK, MM	
NDH :		31		Nama Coach : Sri Mulyati, SE, MM	
Instansi :		Ditjen Bimas Kristen			
No	Tanggal Coaching	Isu/ Permasalahan yang Dihadapi	Media Komunikasi	Hasil Coaching	Tanda Tangan Coach
1	26 Mei 2025	Perbaikan RAB	Whatsup	Perbaikan dikirim	
2	29 Mei 2025	Identifikasi awal masalah integrasi SINDAK dengan layanan SPKK (silo sistem, duplikasi input data	Komunikasi lewat Telp	kolaborasi dengan Prakom	
3	3 Juli 2025	Alur layanan SPKK berbasis SINDAK	Whatsup	Dibuat berdasarkan	
4		Keterbatasan SDM Prakom memperlambat perbaikan sistem	Via Telp	Maksimalkan kerja Tim	
5	30 Juni 2025	Keterbatasan Infrastruktur TIK	Whatsup	Koordinasi dengan bagian Humas	
6	3 Juli 2025	Pemetaan dan analisis terhadap kebutuhan penyempurnaan sistem	WA Group	Koordinasi dan buat analisis dengan Tim Efektif	
7	7 Juli 2025	Terjadi bugs atau eror fitur	Whatsup	koordinasikan dengan Prakom	
8	11 Juli 2025	Sosialisasi internal yang belum terlaksana karena banyak ASN direktorat Pendidikan yang dinas luar	Whatsup	Jadwalkan lagi	
*) Coaching yang sah adalah yang sudah ditandatangani oleh Coach					
Jakarta, Juli 2025					
Sri Mulyati, SE, MM					

Lampiran 10

		LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Kepemimpinan dan Moderasi Bersama BMBPSDM		PESERTA	
KARTU KENDALI PROSES MENTORING PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN XVIII TAHUN 2025					
Nama Peserta : Santi Yanti Kalangi		Nama Mentor : Dr. Suwarsono, S.PAK, MM			
NDH : 31		Nama Coach : Sri Mulyati, SE, MM			
Instansi : Ditjen Bimas Kristen					
No	Tanggal Mentoring	Isu/Permasalahan yang Dihadapi	Media Komunikasi	Hasil Mentoring	Tanda Tangan Mentor
1	23 Mei 2025	arah pengembangan Aksi Perubahan	Tatap Muka	Persetujuan Mentor	
2	26 Mei 2025	Pembentukan TIM efektif	Tatap muka	Persetujuan mentor untuk tim efektif	
3	5 Juni 2025	Pengembangan Aplikasi	Tatap Muka	Persetujuan Mentor	
4	6 Juni 2025	Rancangan Fitur	Tatap Muka	Sesuai Kebutuhan	
5	12 Juni 2025	Tim Efektif yang dinas luar sehingga tidak maksimal dalam	Tatap Muka	Koordinasi secara intens	
6	20 Juni 2025	Keterbatasan Infrastruktur T	Via Whats Up	Koordinasi dengan Sekretaris Ditjen	
7	25 Juni 2025	Sosialisasi internal yang belum terlaksana karena banyak ASN direktorat Pendidikan yang dinas luar	Tatap muka	Dijadwalkan lagi	
8	8 Juli 2025	Sosialisasi tertunda karena ada pekerjaan yang mendesak	Tatap muka	Dijadwalkan lagi	
*) Coaching yang sah adalah yang sudah ditandatangani oleh Mentor					

Jakarta, Juli 2025



Dr. Suwarsono, S.PAK, MM

Lampiran 11

FORMULIR PELAKSANAAN MENTORING

Lampiran 2
 Surat Nomor: 7222/D.3/PDP.07

No	MENTEE		MENTOR	
1	NAMA	Santi Yanti Kalangi	NAMA	: Dr. Suwarsono, S.PAK, MM
2	NIP	: 197709272006042001	NIP	: 196711161989031004
3	PANGKAT/GOL. RUANG	: Pembina Tingkat I, IV/b	PANGKAT/GOL. RUANG	: Pembina Tingkat I, IV/b
4	JABATAN	Kepala Sub Direktorat Pendidikan Menengah	JABATAN	: Direktur Pendidikan Kristen
5	UNIT KERJA	Ditjen Bimas Kristen	UNIT KERJA	Ditjen Bimas Kristen

TUJUAN: APA YANG INGIN SAYA CAPAI?
KEBERLANJUTAN PROYEK PERUBAHAN/AKSI PERUBAHAN*

TAHAP	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (1)	BASELINE TARGET (2)	TARGET (3)	STRATEGI PENCAPAIAN TARGET (4)
JANGKA MENENGAH	Terimplementasinya integrasi layanan penerbitan Ijin penyelenggaraan SPPK	1 - 2 bulan	3 bulan	Komunikasi/kordinasi dan harmonisasi dengan seluruh stakeholder internal
	Terlaksananya monitoring dan evaluasi fitur dalam aplikasi	2 - 3 bulan	5 bulan	Komunikasi/kordinasi dan harmonisasi dengan seluruh stakeholder internal dan eksternal untuk perbaikan
JANGKA PANJANG	Terealisasinya pengembangan aplikasi yang terintegrasi dengan pusdatin	6 bulan	12 bulan	Penyusunan Kebijakan implementasi ditingkat pimpinan, Komitmen bersama seluruh stakeholder Ditjen Bimas Kristen

FAKTA: DIMANA SAYA SEKARANG?

TAHAP	TARGET SKP (5)	PROGRES PENCAPAIAN TARGET (6)	MASALAH/HAMBATAN (7)	PENYEBAB (8)
JANGKA MENENGAH	Sosialisasi implementasi aplikasi SINDAK yang telah dioptimalkan dengan fitur penerbitan izin penyelenggaraan SPKK	Telah disosialisasikan	Masih banyak SPKK yang tidak ikut karena agenda sekolah padat	Agenda penerimaan siswa baru dan persiapan awal semester
	Monitoring dan evaluasi penggunaan aplikasi SINDAK yang dioptimalkan	Perbaikan sistem dan evaluasi fitur	masih terbatasnya kapasitas bandwidth	Sering mengalami gangguan
JANGKA PANJANG	Aplikasi yang terintegrasi dengan Pusdatin	Koordinasi dengan Tim IT Ditjen Bimas Kristen dan Biro HDI Kemenag	Aplikasi berbasis Web belum siap digunakan	Belum tersedianya anggaran

PELUANG: APA YG DAPAT DIMANFAATKAN UNTUK MELAKSANAKAN PROYEK PERUBAHAN/AKSI PERUBAHAN UNTUK MENCAIPI TARGET JANGKA MENENGAH DAN JANGKA PANJANG (9)

Melibatkan Tim Pranata Komputer dan bagian perencanaan
LANGKAH KEDEPAN: APA YANG AKAN SAYA LAKUKAN KE DEPAN?

Section	WORLD FOR SENIORS (HONORS CORE)	CONCEPT-DRIVEN PROJECTING PROBLEM/ISSUE/TOY (C)
GENERAL DESCRIPTION	Students are working on a project that is a part of the curriculum. They are working on a project that is a part of the curriculum. They are working on a project that is a part of the curriculum.	Students are working on a project that is a part of the curriculum. They are working on a project that is a part of the curriculum. They are working on a project that is a part of the curriculum.
PROJECT PURPOSE	Students are working on a project that is a part of the curriculum. They are working on a project that is a part of the curriculum. They are working on a project that is a part of the curriculum.	Students are working on a project that is a part of the curriculum. They are working on a project that is a part of the curriculum. They are working on a project that is a part of the curriculum.

—

Abstract

January, Vol. 2019

Downloaded from <http://www.jstor.org/stable/2322444>



● 2014年12月10日

- [illegible]

— 784 —

Lampiran 12

Formulir 9C : Persetujuan Pemilihan Mata Pelatihan Pilihan dalam Penyusunan Implementasi Aktualisasi Kepemimpinan dari Pembimbing (Coach)

(Bersama dengan formulir 9B dan 9D sebagai acuan dalam memilih mata pelatihan yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan pelatihan struktural kepemimpinan)

Nama Peserta : Santi Yanti Kalangi
 NDIH : 31
 Unit Kerja/Satker : Ditjen Bimas Kristen
 Nama Coach : Sri Mulyati, SE, MM

	<u>Judul</u> Aksi Perubahan	<u>Mata Pelatihan</u>	<u>Jalur Pembelajaran</u>	<u>Hubungan dengan Aksi Perubahan</u>	<u>Sumber pembelajaran</u>
1	1	2	3	4	5
1	OPTIMALISASI SINDAK DALAM INTEGRASI LAYANAN PENERBITAN IZIN PENYELENGGAHAAN	Membina Kerja Sama Tim (2 JPL)	MOOC	Dalam pelaksanaan aksi perubahan, pasti akan ada tantangan komunikasi, perbedaan kepentingan, atau bahkan resistensi perubahan. Materi membina kerjasama tim mengajarkan cara mengelola konflik, membangun kesepakatan, dan memfasilitasi kerja sama produktif, yang sangat penting saat menghadapi dinamika tersebut.	Di LMS MOOC: ASN Berpijat Penyelenggara: LAN RI Sertifikat: Sertifikat Mata Pelatihan Pilihan - Google Drive
2		Mengaktifkan Transformasi Digital di	MOOC	Materi ini disusun untuk melakukan transformasi digital di sektor pemerintahan, yaitu melalui proses	Di LMS MOOC: ASN Berpijat Penyelenggara: LAN RI

		Sektor Pemerintahan (4 JP)		memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi layanan publik, memantapkan struktur yang transparan, akuntabel dan rasional serta meningkatkan integritas pelayanan dan pelayanan berbasis data.	Sertifikat: Sertifikat Mata Pelatihan Pilihan - Google Drive
3		Literasi Digital (14 Jam)	MOOC	Literasi digital memberi pengetahuan untuk mengakses, memahami, dan mengelola informasi digital di platform seperti SINDAK secara efisien. Juga membantu agar lebih percaya diri, kreatif, guru dan efisien dalam memanfaatkan SINDAK sebagai salah pelayanan publik digital.	Di LMS MOOC: ASN Berpijat Penyelenggara: LAN RI Sertifikat: Sertifikat Mata Pelatihan Pilihan - Google Drive

* Form yang telah diisi yang sudah ditandatangani oleh coach.

Jakarta, 2025
 Coach,

Ditandatangani Pemohon Izin :

(1) Ditanda,
 (2) Jarak, tanggal Aksi Perubahan
 (3) Mata Pelatihan Pilihan yang dipilih
 (4) Jalur pembelajaran, Bimbingan / Bimbingan / Bimbingan, Bimbingan,
 MOOC, Belajar Mandiri (M), gabungan lain, kombinasi : ada
 kombinasi, ada never tidak,
 (5) Sertifikat / Sertifikat pelatihan mata pelatihan pilihan yang diambil
 dengan Aksi Perubahan
 (6) Sertifikat pembelajaran, Di dalam LMS Kepemimpinan,
 (7) Koneksi guru, / Di luar LMS Kepemimpinan, (8) Koneksi guru, (9)
 koneksi, Di LMS Berpijat, Sertifikat, Bimbingan

Sri Mulyati, SE, MM
 NIP.197705112005012008

Lampiran 13

**INSTRUMEN MONITORING IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN
PELATIHAN KEPIMPINAN TK. III ANGKATAN XXIII
KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2023**

 **Revisi**
Uraian

1. SANTI NINTI KALINGI
2. DITZEN RIMAS KRISTEN

Waktu

NO.	KOMPONEN	TARGET WAKTU	CAPAIAN/ OUTPUT	IMPLEMENTASI S/TS*	BUNTI	KENDALA	SOLUSI
I	30001. OPTIMALISASI SISTEM INFORMASI DATA AGAMA KRISTEN (SINDAK) MELALUI INTEGRASI LAYANAN PENERBITAN IZIN PENTELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN KRISTEN (SPKOK)						
II	ABSTRACT AKSI PERUBAHAN						
	Aksi perubahan berjudul "Optimalisasi Sistem Informasi Data Agama Kristen (SINDAK) melalui Integrasi Layanan Penerbitan Izin Penyelenggaraan SPKOK" bukan sekedar sebuah program teknologi, melainkan bentuk nyata dari komitmen penulis untuk mendorong pelayanan yang lebih baik, akurat, dan adaptif di lingkungan Direktorat Pendidikan, Ditjen Bimas Kristen. Dalam era digital yang terus bergerak cepat, kebutuhan akan sistem informasi yang lengkap menjadi keharusan—terlebih dalam layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti penerbitan izin SPKOK (Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen). Melalui aksi perubahan ini, penulis tidak hanya menawarkan solusi sistematis terhadap persoalan administrasi layanan, tetapi juga memulai proses transformasi budaya kerja. SINDAK dibangun bukan sekadar sebagai alat digital, melainkan sebagai ruang kerja bersama, tempat data dipertanggungjawabkan, pelayanan dipercayai, dan koordinasi antar-unit menjadi lebih cair dan kolaboratif. Penulis sadar bahwa sistem yang baik harus didukung oleh manusia-manusia yang juga siap berubah, terbuka terhadap perubahan, dan memiliki rasa kepemilikan terhadap proses yang sedang dijalankan. Proses dimulai dengan koordinasi bersama Mentor, diikuti konsultasi tim untuk menyepakati Rur yang dikembangkan. Tahap berikutnya meliputi validasi kebutuhan, desain alur kerja pengguna, pengembangan prototipe, dan pengujian sistem. Melalui serangkaian uji coba internal menghasilkan perbaikan signifikan. Setelah sistem dinyatakan stabil, dilakukan sosialisasi internal dan eksternal kepada seluruh stakeholder, termasuk Kepala Kantor Pendidikan dan SPKOK se-Indonesia. Respons sangat positif, dengan dukungan penuh terhadap Rur baru serta						

	masukan untuk penyempurnaan seperti perbaikan layout dan PIC layanan. Langkah Kritis dari implementasi Aksi perubahan jangka pendek telah berhasil 100% dilaksanakan bahkan sudah ada rencana jangka menengah yang sudah dilaksanakan. Fitur layanan izin SPKOK kini telah terintegrasi secara daring di aplikasi SINDAK. Tidak hanya itu, strategi komunikasi publik pun diperkuat melalui media sosial dan publikasi daring sebagai bagian dari keterbukaan informasi kepada masyarakat. Selain keterbukaan dalam hal teknis dan sistem, dampak dari aksi ini juga terasa dalam hal kepercayaan publik yang mulai tumbuh terhadap layanan keagamaan berbasis data. Lembaga penyelenggara SPKOK kini merasa lebih dilayani, lebih mudah mengakses informasi, dan lebih cepat mendapatkan keputusan izin. Di sisi lain, internal ASN yang terlibat menjadi lebih memahami urgensi keterbukaan, kecapatan, dan akurasi kerja. Transformasi ini tentu tidak sempurna dan masih menyisakan ruang-ruang perbaikan. Namun jalan di situ lah makna dari proses perubahan: bahwa perubahan adalah perjalanan panjang yang memerlukan keberanian untuk memulai, ketekunan untuk mendengar masukan, dan ketahanan untuk menjaga semangatnya tetap menyala. Aksi perubahan ini menjadi pondasi penting untuk membangun sistem yang lebih matang ke depannya. Aksi ini membuktikan bahwa inovasi yang kolaboratif dan responsif mampu menghasilkan layanan publik yang lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap kebutuhan zaman. Penulis berharap, apa yang telah dirintis melalui SINDAK ini dapat menjadi inspirasi dan model bagi kerja-kerja transformasi serupa di masa depan—bahwa sistem yang dibangun dengan nilai, dilandaskan dengan kolaborasi, dan dikembangkan secara berkelanjutan, akan melahirkan dampak yang lebih dari sekadar data dan izin, tetapi juga membangun kepercayaan, kualitas, dan pelayanan yang bermartabat.						
III	TAHAPAN/MILESTONE						
	Jangka Pendek						
1	Membuatkan pertemuan dengan Mentor untuk mengkoordinasikan, mengawasi, Aksi perubahan dan mengembangkan Tim Eksekutif		- Laporan proses aksi perubahan - Akurasi dan kuantitas output - Kualitas implementasi		https://bit.ly/gg-cmshfnyfhders/1_BALINGO3dLpVJ0w7mZTLgRr-VW		

1	Melaksanakan Sosialisasi ke semua SPRK Tingkat Dasar dan Menengah.
2	Implementasi layanan penerbitan izin penyelenggaraan SPRK Tingkat Dasar dan Menengah melalui aplikasi SINDAK
3	Melaksanakan monitoring dan evaluasi aplikasi untuk menentukan flur apa saja yang sudah sesuai, dan flur apa saja yang perlu ditambahkan ke dalam aplikasi juga identifikasi error pada aplikasi
4	Melakukan Perubahan berdasarkan hasil evaluasi

Jangka Panjang

1.	Melaksanakan rapat koordinasi untuk mengevaluasi aplikasi secara Periode.
2.	Memutakhirkan Laporan ke Direk Puskabes
3.	Memperbaiki aplikasi secara terus menerus.

IV STAKEHOLDERS

A. Internal						
1.	Direk Dinas Krimin					
2.	Kesekret. Pendidikan Menengah					
3.	Staf Subdit Pendidikan Menengah dan TIM IT dan Tata Usaha					
4.	Staff Puskabes					
B. Eksternal						
	Kesekret. Satuan Pendidikan Keagamaan					
	Pengurus Yayasan					
	Operator Sekolah					
	Kesekret. Sekolah					

V	SARAN TINDAK LANJUT	
VI	SIMPULAN	

* E/TS = SESUAI/TIDAK SESUAI
 Refugas Monitoring
 NAMA DAN TANDA TANGAN

Refugas
 NAMA DAN TANDA TANGAN

SANTI YANTI KALANGI

REFRENSI

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. <https://www.kemenag.go.id/>

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Ditjen Bimas Kristen. <https://www.kemenag.go.id/>

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. Jakarta: Kementerian Agama RI. <https://jdih.kemenag.go.id>

Ditjen Bimas Kristen. (2024). Evaluasi dan Penyusunan Renstra Ditjen Bimas Kristen: Menuju Transformasi Pelayanan Umat yang Lebih Baik. <https://bimaskristen.kemenag.go.id/news-977-evaluasi-dan-penyusunan-renstra-ditjen-bimas-kristen-menuju-transformasi-pelayanan-umat-yang-lebih-baik--.html>

Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI. (n.d.). Produk hukum. <https://bimaskristen.kemenag.go.id/allprokum.html>

Sistem Informasi Data Agama Kristen (SINDAK) Kementerian Agama RI. (n.d.). Website Sistem Informasi Data Agama Kristen. <https://sindak.kemenag.go.id/>

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen*. Jakarta: Kemenag RI.

Presiden Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2023). *Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Manajemen Talenta ASN*. Jakarta: Kementerian PANRB.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024*. Jakarta: Bappenas.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2018). *Roadmap Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)*. Jakarta: Kementerian PANRB.

Lembaga Administrasi Negara. (2022). *Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator*. Jakarta: LAN RI.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen. (2023). *Dokumen Pengembangan Sistem Informasi Data Agama Kristen (SINDAK)*. Jakarta: Ditjen Bimas Kristen, Kementerian Agama RI.

Direktorat Pendidikan Kristen. (2023). *Data Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen (SPKK) Tahun 2023–2025*. Jakarta: Ditjen Bimas Kristen, Kementerian Agama RI.